

PERUBAHAN RENCANA KERJA

T.A 2023

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV. SULSEL



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kondisi Indonesia sampai dengan tahun 2023 diperkirakan masih dipengaruhi oleh pandemic covid-19 sehinggah pembangunan di Indonesia dan Khususnya di Sulawesi Selatan diarahkan untuk mendukung kondisi tersebut, selain itu kita juga masih menghadapi revolusi industri dan transformasi digital (era revolusi industri 4.0) dimana peran manusia menjadi terbatas yang dikuasai oleh industri dan teknologi komunikasi agar mengurangi kontak langsung untuk menghindari penyebaran virus covid-19. Disisi lain perkembangan teknologi yang begitu pesat terutama teknologi digital dapat menyebabkan kerawanan tersendiri dari sisi IPOLEKSOSBUDHUKAM terutama peredaran berita bohong atau hoaks yang dapat mengancam 4 pilar yaitu 1. Pancasila, 2. UUD 1945, 3.Bhineka Tunggal Ika, 4. NKRI, selain itu transaksi digital juga sering dimnafaatkan perdagangan gelap dan penyalah gunaan narkotika, serta tindakan criminal lainnya terutama yang dapat menganggu stabilititas keamanan dan kondisi politik di Sulawesi Selatan.

Pembangunan suatu daerah tidak lepas dari stabilitas daerah tersebut ditinjau dari segi IPOLEKSOSBUDHUKAM karena suatu daerah tidak bisa melakukan pembangunan jika stabilitas daerah tidak kondusif. Oleh karena itu pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945. Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut harus dilaksanakan secara cermat, tepat dan akurat sehingga diperlukan suatu perencanaan yang sistematis dan berkesinambungan.

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Gubernur merupakan Wakil Pemerintah Pusat di daerah yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Umum dan OPD yang melaksanakan tugas Pemerintahan Umum adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, namun dalam pelaksanaannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga terlibat dalam melaksanakan tugas absolute dan konkuren.

1.2. Landasan Hukum

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN:
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana tetah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Ripublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64O2).
- 5. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Prinsip *Good Governance* yang diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangungan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
 - 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan iventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
 - 13. Peraturan Daerah Prov. Sulsel No. 10 Tahun 2008 tentang RPJPD Prov. Sulsel tahun 2008-2028;
 - 14. Peraturan Daerah Prov. Sulsel No. 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023:
 - 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika
 - Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021, tanggal 29 Desember 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Memberikan pedoman bagi pencapaian tujuan jangka pendek Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel dengan memperhatikan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel.

Tujuan

Tercapainya tujuan dan sasaran program kerja Badan Kesbangpol Prov. Sulsel Tahun 2023 secara efektif dan efisien sesuai kebijakan, program dan strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra Bakesbangpol Prov. Sulsel Tahun 2018 – 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Bakesbangpol Prov. Sulsel Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan Renja Bakesbangpol Prov. Sulsel Tahun 2023.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah merupakan Bab yang memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah merupakan Bab yang memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan, Sasaran Renja Badan Kesbangpol Prov. Sulsel, Program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah merupakan Bab yang memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

Bab V Penutup merupakan Bab Penutup.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Renja Tahun 2021 secara keseluruhan dapat dicapai dengan tingkat capaian rata-rata 100%, walaupun pada tahun 2021 Indonesia masih mengalami bencana nasional yaitu wabah Covid-19 akan tetapi kita tetap bisa melaksanakan program kegiatan sesuai target yang ada, dengan Rincian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan capaian 100%, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan capaian 368.75 %, Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya dengan capaian 100%, Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan capaian 125%, Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan capaian 112.62%, Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan capaian 75%.

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2023

Pada tahun 2023 merupakan akhir periode Renstra Bakesbangpol sehingga tingkat pencapaian indikator diharapkan memenuhi total pencapaian akhir periode Renstra dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Program ini memiliki 3 indikator, 8 kegiatan, dan 56 sub kegiatan, sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan dapat dicapai dengan realisasi capaian sebesar rata-rata 100% dengan tingkat capaian akhir periode renstra 100%, dalam hal ini diperkirakan bakesbangpol prov sulsel dapat memenuhi seluruh targer resntra, Program ini terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut;
 - A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, sub kegiatan Koordinasi

- dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Sub kegiatan Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- D. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material, Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- F. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari Sub kegiatan Pengadaan Mebel, Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

- G. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- H. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
 - Program ini memiliki 1 indikator, 1 kegiatan, dan 6 sub kegiatan, sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan dapat dicapai dengan realisasi capaian sebesar 20% dengan tingkat capaian akhir periode renstra 60%, dalam hal ini diperkirakan bakesbangpol prov sulsel dapat memenuhi seluruh targer resntra, Program ini terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut;
- A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dan terdiri dari beberapa sub kegiatan yang meliputi, sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan, sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.

3. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.

Program ini memiliki 1 indikator, 1 kegiatan, dan 5 sub kegiatan, sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan dapat dicapai dengan realisasi capaian sebesar 20% dengan tingkat capaian akhir periode renstra 60%, dalam hal ini diperkirakan bakesbangpol prov sulsel dapat memenuhi seluruh targer resntra, Program ini terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut;

- A. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, yang meliputi sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan, sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan, sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan, sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan, sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.
- 4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
 Program ini memiliki 2 indikator, 1 kegiatan, dan 5 sub kegiatan, sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan dapat dicapai dengan realisasi capaian pada Indikator Persentase Penyalahgunaan Narkoba sebesar 20% dengan tingkat capaian akhir periode renstra 40% dan indikator Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani sebesar 100% dengan tingkat capaian akhir periode renstra 100%, dalam hal ini diperkirakan bakesbangpol prov sulsel dapat memenuhi seluruh targer resntra, Program ini terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut;
 - A. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang terdiri dari beberapa sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi

Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

- 5. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
 - Program ini memiliki 1 indikator, 1 kegiatan, dan 5 sub kegiatan, sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan dapat dicapai dengan realisasi capaian sebesar 20% dengan tingkat capaian akhir periode renstra 60%, dalam hal ini diperkirakan bakesbangpol prov sulsel dapat memenuhi seluruh targer resntra, Program ini terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut;
 - A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dan sub kegitan Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

- 6. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik ketahanan Ekonomi Daerah. Program ini memiliki 1 indikator, 1 kegiatan, dan 5 sub kegiatan, sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan dapat dicapai dengan realisasi capaian sebesar 82% dengan tingkat capaian akhir periode renstra >79%, dalam hal ini diperkirakan bakesbangpol prov sulsel dapat memenuhi seluruh targer resntra, Program ini terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut;
 - A. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dan terdiri dari sub kegitan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Demokrasi, Pemantauan Situasi Politik di Peningkatan Daerah Fasilitasi Kelembagaan, sub kegiatan enyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pemantauan Situasi Politik di DaerahFasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta, sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Perwakilan, Partai Politik, Kelembagaan Pemerintahan, dan Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/PemilihanUmum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada table T-B.3 dibawah ini:

Tabel. T-B.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Provinsi Sulawesi Selatan

Nam	a Perangl	at Daerah :	: Badan Ke	satuan B	ngsa dan Politik Prov. Sulsel																
									DEAL	LISASI		Target dan	Realisasi Kinerja Prog	ram dan	Kegiatan Tahun 2021			Target Program	Perkiraan Realis Target Renstra Pera s/d tahun b	angkat Daerah	
NC		K	ODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/S UBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TAHUN 2	T RENSTRA PADA 2018 s/d 2023 (Akhir ENSTRA PERANGKAT DAERAH)	CAP. KINERJA s/d I TAHUI	AIAN A RPJMD RKPD N LALU 020)		ET KINERJA DAN ANGO UN BERJALAN YANG D		DAN SKPD	ASI CAPAIAN KINERJA ANGGARAN RENJA YANG DI EVALUASI 021) (Tahun n-1)	TING CAPAIAN DAN REA ANGGARA TAHUN	KINERJA ALISASI AN RKPD	dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun N- 1) 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	KET.
							К	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	K	Rp.	К	Rp.	К	Rp.			
1			2		3	4		6		7		8		1	3 = 9+10+11+12	14 = 13/8	3 * 100%	16 =	15/6*100%	17	18
	8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																
	8 01				KESATUAN BANGSA DAN																
					POLITIK																
	8 01	0.00.0.0			Badan Kesatuan Bangsa																
		25.000			dan Politik																
	8 01	0.00.0.0 25.000			IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara	60.0	874,625,959.48	0.0	0.0	20.0	274,996,630.0	168,493,630.0	15.0	88,268,130.0	75.0	52.39				
	8 01	0.00.0.0 25.0000		1.0	· ·	Jumlah Peserta Gerakan Bela Negara	1,500.0	874,625,959.48	0.0	0.0	500.0	274,996,630.0	168,493,630.0	500.0	88,268,130.0	100.0	52.39				
						jumlah laporan pembinaan ideologi, karakter, dan wasbang	12.0		0.0		4.0			4.0		100.0					
						jumlah laporan forum pembauran kebangsaan (FPK)	12.0		0.0		4.0			4.0		100.0					

	jumlah laporan	4.0	ı	0.0		4.0			4.0		100.0		l	
	pemantapan pusat	4.0		0.0		4.0			4.0		100.0			
	pendidikan wawasan													
	kebangsaan di daerah													
	kebangsaan di daeran													
	i salah dalaman	40.0	204 640 076 67	0.0	0.0		04 022 620 0	02 422 520 0		20 400 420 0	400.0	42.72		
8 01 0.00.0.00. 8.01. 1.0 01 Penyusunan Progra		18.0	301,618,076.67	0.0	0.0	6.0	94,833,630.0	92,433,630.0	6.0	39,488,130.0	100.0	42.72		
25.0000 02 1 Kerja di Bidang Ideo														
Wawasan Kebangsa	1 1													
Bela Negara Karakti														
Bangsa Pembauran	Bela Negara Karakter													
Kebangsaan Bhinek														
Tunggal Ika dan Sej														
Kebangsaan	Tunggal Ika dan Sejarah													
	Kebangsaan													
8 01 0.00.0.00. 8.01. 1.0 04 Pelaksanaan Koord		9.0	573,007,882.81	0.0	0.0	3.0	180,163,000.0	76,060,000.0	3.0	48,780,000.0	100.0	64.13		
	vasan Pelaksanaan Koordinasi													
Kebangsaan Bela N														
Karakter Bangsa	Wawasan Kebangsaan													
Pembauran Kebang	aan Bela Negara Karakter													
Bhineka Tunggal Ika	dan Bangsa Pembauran													
Sejarah Kebangsaar	Kebangsaan Bhineka													
	Tunggal Ika dan Sejarah													
	Kebangsaan													
											40.0	10.50		
Rata-Rata Capaian	linerja										40.0	10.69		
(%) Predikat Kinerja														
	ATAN Persentase Tingkat	82.01	24,286,876,498.55	0.0	0.0	81.70	7,636,189,068.0	6,986,849,456.0	92.01	6,686,535,917.0	112.62	95.70		
25.0000 03 PERAN PARTAI POL		62.01	24,200,070,496.33	0.0	0.0	81.70	7,030,169,006.0	0,960,649,430.0	92.01	0,000,333,917.0	112.02	95.70		
	1													
DAN LEMBAGA	dalam pemilu													
PENDIDIKAN MELAI														
PENDIDIKAN POLITI														
PENGEMBANGAN E														
SERTA BUDAYA POI	пк													

8		0.00.0.00 25.0000		1.0		Jumlah Dokumen Pemetaan dan Evaluasi Kondisi Politik di Sulsel	6.0	24,286,876,498.55	0.0	0.0	2.0	7,636,189,068.0	6,986,849,456.0	2.0	6,686,535,917.0	100.0	95.70		
						Jumlah Peserta Pendidikan Politik Masyarakat	300.0		0.0		100.0			100.0		100.0			
						Jumlah Laporan Bantuan Keuangan Parpol	3.0		0.0		1.0			1.0		100.0			
						Jumlah Pertemuan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia	3.0		0.0		1.0			1.0		100.0			
8	01	0.00.0.00 25.0000	. 8.01. 03	1.0 01	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan	3.0	129,589,668.72	100.0	0.0	1.0	40,745,100.0	19,137,500.0	1.0	18,850,500.0	100.0	98.50		
						jumlah dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.0		0.0		1.0			1.0		100.0			

				. 1.	1	1							1				 1		
8 0:			l. [1.0 0	2 Penyusunan Bahan	jumlah laporan	3.0	551,625,401.41	100.0	0.0	1.0	173,440,000.0	118,499,500.0	1.0	103,619,445.0	100.0	87.44			
	25.000	0 03	1	Perumusan Kebijakan di	Penyusunan Bahan														
				Bidang Pendidikan Politik	Perumusan Kebijakan di														
				Etika Budaya Politik	Bidang Pendidikan														
				Peningkatan Demokrasi	Politik Etika Budaya														
				Fasilitasi Kelembagaan	Politik Peningkatan														
				Pemerintahan Perwakilan															
				dan Partai Politik	Kelembagaan														
				Pemilihan	Pemerintahan														
				UmumPemilihan Umum	Perwakilan dan Partai														
				Kepala Daerah Serta	Politik Pemilihan														
				Pemantauan Situasi Politil															
				di Daerah	Kepala Daerah Serta														
					Pemantauan Situasi														
					Politik di Daerah														
	1				jumlah laporan	6.0		0.0		1.0			1.0		100.0				
					Penyusunan Bahan	0.0		5.0		1.0			1.0						
					Perumusan Kebijakan di														
					Bidang Pendidikan														
					Politik Etika Budaya														
					Politik Peningkatan														
					Demokrasi Fasilitasi														
					Kelembagaan														
					Pemerintahan														
					Perwakilan dan Partai														
					Politik Pemilihan														
					UmumPemilihan Umum														
					Kepala Daerah Serta														
					Pemantauan Situasi														
					Politik di Daerah														
8 0:	1 0.00.0.	00. 8.01	l. 1.0 0	3 Pelaksanaan Kebijakan di	jumlah laporan	3.0	23,126,405,055.98	100.0	0.0	1.0	7,271,317,968.0	6,729,439,456.0	1.0	6,495,242,372.0	100.0	96.52			
	25.000	0 03	1	Bidang Pendidikan Politik	Pelaksanaan Kebijakan														
				Etika Budaya Politik	di Bidang Pendidikan														
				Peningkatan Demokrasi	Politik Etika Budaya														
				Fasilitasi Kelembagaan	Politik Peningkatan														
				Pemerintahan Perwakilan															
				dan Partai Politik	Kelembagaan														
				Pemilihan	Pemerintahan														
				UmumPemilihan Umum	Perwakilan dan Partai														
				Kepala Daerah Serta	Politik Pemilihan														
				Pemantauan Situasi Politil															
				di Daerah	Kepala Daerah Serta														
					Pemantauan Situasi														
					Politik di Daerah														
1 1 1		- 1	1	1	1	1				i	1	i	1	i		i	1	ı	1

						1														
						jumlah laporan	33.0		0.0		11.0			11.0		100.0				
						Pelaksanaan Kebijakan														
						di Bidang Pendidikan														
						Politik Etika Budaya														
						Politik Peningkatan														
						Demokrasi Fasilitasi														
						Kelembagaan														
						Pemerintahan														
						Perwakilan dan Partai														
						Politik Pemilihan														
						UmumPemilihan Umum														
						Kepala Daerah Serta														
						Pemantauan Situasi														
						Politik di Daerah														
6 /	01 C	00 0 00	0.01	1.0.0	Pelaksanaan Koordinasi di	jumlah laporan	9.0	173,422,960.46	100.0	0.0	3.0	54,527,000.0	48,307,000.0	3.0	28,287,800.0	100.0	58.56			
8				1.0 0			9.0	1/3,422,960.46	100.0	0.0	3.0	54,527,000.0	48,307,000.0	5.0	28,287,800.0	100.0	58.56			
	25	5.0000	03	1		Pelaksanaan Koordinasi														
					Etika Budaya Politik	di Bidang Pendidikan														
					Peningkatan Demokrasi	Politik Etika Budaya														l
					Fasilitasi Kelembagaan	Politik Peningkatan														
					Pemerintahan Perwakilan	Demokrasi Fasilitasi														
					dan Partai Politik	Kelembagaan														
					Pemilihan	Pemerintahan														
					UmumPemilihan Umum	Perwakilan dan Partai														
					Kepala Daerah Serta	Politik Pemilihan														
					Pemantauan Situasi Politik															
					di Daerah	Kepala Daerah Serta														
					di Daeran															
						Pemantauan Situasi														
						Politik di Daerah														
	-		-			ialah lanasan	0.0		0.0		2.0			2.0		100.0				
						jumlah laporan	9.0		0.0		3.0			3.0		100.0				
						Pelaksanaan Koordinasi														
1 11			1	1	1	di Bidang Pendidikan														
			1	1	1	Politik Etika Budaya														
1 11			1	1	1	Politik Peningkatan														
			1	1	1	Demokrasi Fasilitasi														
						Kelembagaan														
						Pemerintahan														
						Perwakilan dan Partai														
						Politik Pemilihan														
						UmumPemilihan Umum														
						Kepala Daerah Serta														
						Pemantauan Situasi														
	04 6	00 0 02	0.04	4.0.00	Pelaksanaan Monitoring	Politik di Daerah	3.0	205 022 111 00	400.0	0.0	4.0	00 450 000 0	74 455 000 0	4.0	40 525 222 2	400.0	FC 70			
8		00.0.00.		1.0 05		jumlah laporan	3.0	305,833,411.98	100.0	0.0	1.0	96,159,000.0	71,466,000.0	1.0	40,535,800.0	100.0	56.72			
	25	5.0000	03	1	Evaluasi dan Pelaporan di	Pelaksanaan Monitoring														
					Bidang Pendidikan Politik	Evaluasi dan Pelaporan														
					Etika Budaya Politik	di Bidang Pendidikan														
					Peningkatan Demokrasi	Politik Etika Budaya														
					Fasilitasi Kelembagaan	Politik Peningkatan														
					Pemerintahan Perwakilan	Demokrasi Fasilitasi														
					dan Partai Politik	Kelembagaan														

						1								ı					1		
							jumlah laporan	3.0		0.0		1.0			1.0		100.0				
							Pelaksanaan Monitoring														
							Evaluasi dan Pelaporan														
							di Bidang Pendidikan														
							Politik Etika Budaya														
							Politik Peningkatan														
							Demokrasi Fasilitasi														
							Kelembagaan														
							Pemerintahan														
							Perwakilan dan Partai														
							Politik Pemilihan														
							UmumPemilihan Umum														
							Kepala Daerah serta														
							Pemantauan Situasi														
							Politik di Daerah														
	1 1					Rata-Rata Capaian Kinerja							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				100.0	15.91			1
						(%)													1		
T	\Box				1	Predikat Kinerja															
s	01	0 00 0	0.00. 8	R N1		PROGRAM	Persentase Organisasi	60.0	6,887,179,446.40	0.0	0.0	20.0	2,165,441,258.0	140,728,600.0	25.0	129,899,408.0	125.0	92.30			
ľ	[]		000			PEMBERDAYAAN DAN	Kemasyarakatan yang	55.0	0,007,173,770.40	0.0	5.5	20.0	_,_00,1,_00.0	140,720,000.0	25.0	223,033,400.0	123.0	J2.30	İ		
		23.00	000	04		PENGAWASAN	memenuhi 4 konsensus														
						ORGANISASI	kebangsaaan														
						KEMASYARAKATAN															
8	01	0.00.0	0.00. 8	8.01.	1.0	Perumusan Kebijakan	Jumlah Usulan Surat	3.0	6,887,179,446.40	0.0	0.0	4.0	2,165,441,258.0	140,728,600.0	5.0	129,899,408.0	125.0	92.30			
		25.00	000	04	1	Teknis dan Pemantapan	Keterangan Terdaftar														
						Pelaksanaan Bidang	yang Dikelola														
						Pemberdayaan dan	yang zmeroid														
						Pengawasan Organisasi															
						Kemasyarakatan															
																			İ		
0	01	0 00 0	0.00. 8	R Ω1	1.0.0	Penyusunan Bahan	Jumlah Dokumen	3.0	168,773,073.84	100.0	0.0	1.0	53,065,000.0	16,343,000.0	1.0	16,343,000.0	100.0	100.0	-		
٥	01		000	0.01.	1.0 0.	Desumuses Vehicles		5.0	100,773,073.84	100.0	0.0	1.0	33,003,000.0	10,343,000.0	1.0	10,343,000.0	100.0	100.0	İ		
1		25.00	UUU	04	1	Perumusan Kebijakan	Penyusunan Bahan												1		
						Dibidang Pendaftaran	Perumusan Kebijakan												1		
						Ormas Pemberdayaan	Dibidang Pendaftaran												1		
						Ormas Evaluasi dan	Ormas Pemberdayaan												1		
						Mediasi Sengketa Ormas	Ormas Evaluasi dan												İ		
1						Pengawasan Ormas dan	Mediasi Sengketa Ormas								l				İ		
1						Ormas Asing di Daerah	Pengawasan Ormas dan												1		
1						Omias Asing ai Dacidii	-												1		
							Ormas Asing di Daerah												İ		
-																			 	ļ	
8	01		0.00. 8		1.0 0	Pelaksanaan Kebijakan	Jumlah Laporan	3.0	6,619,698,693.71	100.0	0.0	1.0	2,081,340,958.0	93,350,300.0	1.0	84,361,478.0	100.0	90.37	İ		
		25.00	000	04	1	Dibidang Pendaftaran	Pelaksanaan Kebijakan												1		
						Ormas Pemberdayaan	Dibidang Pendaftaran												1		
1						Ormas Evaluasi dan	Ormas Pemberdayaan												1		
						Mediasi Sengketa Ormas	Ormas Evaluasi dan												1		
1						Pengawasan Ormas dan	Mediasi Sengketa Ormas												1		
																			1		
						Ormas Asing di Daerah	Pengawasan Ormas dan												1		
							Ormas Asing di Daerah														
	1 1																		İ		
- 1																					

8	01	0.00.0.C 25.000			05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rata-Rata Capaian Kinerja	Jumlah Laporan	3.0	98,707,678.85	100.0	0.0	1.0	31,035,300.0	31,035,300.0	1.0	29,194,930.0	100.0	94.07			
$\vdash \vdash$	H			+	(%) Predikat Kinerja			+											+	
8		0.00.0.0 25.0000	00. 8.01 0 05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba (Prioritas)	0.0	3,893,677,029.23	0.0	0.0	0.0	1,224,235,400.0	1,505,441,400.0	58.0	1,427,380,821.0	0.0	94.81			
						Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani	100.0		0.0		100.0			100.0		100.0				
8		0.00.0.0 25.0000	00. 8.01 0 05	1.0	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	jumlah laporan pemetaaan potensi kerawanan terhadap kerukunan umat beragama dan multi etnis	12.0	3,893,677,029.23	0.0	0.0	4.0	1,224,235,400.0	1,505,441,400.0	3.0	1,427,380,821.0	75.0	94.81			
						Jumlah Peserta Dialog publik peningkatan ketahanan lembaga usaha ekonomi kab/kota	100.0		0.0		100.0			100.0		100.0				
						Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi daerah	12.0		0.0		4.0			6.0		150.0				
						Jumlah laporan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	12.0		0.0		4.0			5.0		125.0				
						Jumlah Laporan Satgas Kontra terorisme, radikalisme dan narkoba	12.0		0.0		4.0			4.0		100.0				

8 01 0.00.0.00. 8.01. 1.0 0 25.0000 05 1	2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Penyusunan Bahan Penyusunan Bahan Penyalagunaan Bidan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Penyusunan Bahan Penyalaguna Bidan Penghayat Kepercayaan di Daerah		540,003,865.34	100.0	0.0	4.0	169,786,000.0	301,001,000.0	4.0	300,977,082.0	100.0	99.99		
8 01 0.00.0.00. 8.01. 1.0 0 25.0000 05 1	3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Markotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	9.0	3,196,727,086.24	100.0	0.0	3.C	1,005,103,000.0	1,157,683,000.0	3.0	1,090,641,560.0	100.0	94.21		
8 01 0.00.0.00. 8.01. 1.0 0 25.0000 05 1	4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		142,064,532.14	100.0	0.0	1.0	44,667,400.0	42,078,400.0	1.0	31,465,712.0	100.0	74.78		
8 01 0.00.0.00 8.01. 1.0 0 25.0000 05 1	Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Eeragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Umlah Dokumen Pelaporan di Daerah Umlah Sanahan Penyalagunaan Narkotika Pasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Umlah Sanahan Penghayat Kepercayaan di Daerah		14,881,545.51	100.0	0.0	3.0	4,679,000.0	4,679,000.0	3.0	4,296,467.0	100.0	91.82		

				Rata-Rata Capaian Kinerjo	'										80.0	18.04		
	T			Predikat Kinerja			1											
8 (00.0.00. 8 25.0000	8.01. 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat	60.0	6,023,534,140.13	0.0	0.0	20.0	1,893,897,124.0	2,321,545,100.0	73.75	2,067,332,883.0	368.75	89.05		
8 0		00.0.00. 8 5.0000 0		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Pemetaan Konflik Wilayah	6.0	6,023,534,140.13	0.0	0.0	2.0	1,893,897,124.0	2,321,545,100.0	2.0	2,067,332,883.0	100.0	89.05		
					Jumlah Laporan Pengawasan dan pemantauan Orang Asing NGO dan lembaga asing	12.0		0.0		4.0			4.0		100.0			
					Jumlah Laporan Koordinasi Tiga Pilar Bangdes Mantra	12.0		0.0		4.0			4.0		100.0			
					Jumlah Laporan Pemantauan dan pengendalian Trantibmas	12.0		0.0		4.0			4.0		100.0			
					Jumlah Laporan Pemantauan dan pengendalian unjuk rasa	36.0		0.0		12.0			12.0		100.0			
					Jumlah Objek yang membutuhkan pengamanan	12.0		0.0		4.0			4.0		100.0			
					Jumlah Laporan Forum Kewaspadaan Dini Daerah Prov. Sulsel	12.0		0.0		4.0			4.0		100.0			
					Jumlah peserta rapat koordinasi kewaspadaan dini daerah	300.0		0.0		100.0			137.0		137.0			
					Jumlah Laporan Antisipasi Potensi Ancaman Bangsa	36.0		0.0		12.0			12.0		100.0			
					Jumlah Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	36.0		0.0		12.0			11.0		91.67			

8		8.01. 06	1.0 01	Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi	jumlah dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	3.0	54,068,449.17	100.0	0.0	1.0		17,000,000.0	1.0	0.0	100.0			
					jumlah dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	3.0		0.0		1.0			1.0		100.0			
8		8.01. 06	1.0 02	Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi	jumlah dokumen Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	18.0	104,177,179.56	100.0	0.0	6.0	32,755,000.0	32,755,000.0	6.0	2,677,373.0	100.0	8.17		
					jumlah dokumen Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	18.0		0.0		6.0			6.0		100.0			

8 01 0.00.0.00 25.0000	Penanganan Konflik di	jumlah dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	18.0	2,974,109,864.61	100.0	0.0	6.0	935,108,524.0	1,464,399,500.0	6.0	1,356,333,090.0	100.0	92.62		
		jumlah dokumen Pelaksanaan Kebijakan Dini Kerja sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	18.0		0.0		6.0			6.0		100.0			
8 01 0.00.0.00 25.0000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijien Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah dokumen Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	24.0	470,471,839.70	100.0	0.0	8.0	147,924,000.0	108,056,000.0	8.0	78,129,195.0	100.0	72.30		
		jumlah dokumen Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	24.0		0.0		8.0			8.0		100.0			

8 (0.0	00.0.00.	8.01.	1.0 05	Pelaksanaan Monitoring	jumlah laporan	129.0	754,795,550.42	100.0	0.0	43.0	237,320,000.0	152,540,000.0	43.0	98,150,329.0	100.0	64.34			
	25	.0000	06	1	Evaluasi dan Pelaporan di	Pelaksanaan Monitoring														
					Bidang Kewaspadaan Dini	Evaluasi dan Pelaporan														
					Kerja sama Intelijen	di Bidang Kewaspadaan														
1 1	- 1				Pemantauan Orang Asing	Dini Kerja sama Intelijen					l			l]		1
					Tenaga Kerja Asing dan	Pemantauan Orang														
					Lembaga Asing	Asing Tenaga Kerja Asing														
					Kewaspadaan Perbatasan	dan Lembaga Asing														
					Antar Negara Fasilitasi	Kewaspadaan														
					Kelembagaan Bidang	Perbatasan Antar Negara														
					Kewaspadaan serta	Fasilitasi Kelembagaan														
					Penanganan Konflik di	Bidang Kewaspadaan														
					Daerah	serta Penanganan														
						Konflik di Daerah														
1 11					Ì													1		1
\vdash	-			_		:lab laasaa	150.0		0.0		FC 0			FC 0		100.0				
						jumlah laporan	150.0		0.0		50.0			50.0		100.0				
						Pelaksanaan Monitoring														
						Evaluasi dan Pelaporan														
						di Bidang Kewaspadaan														
						Dini Kerja sama Intelijen														
						Pemantauan Orang														
						Asing Tenaga Kerja Asing														
						dan Lembaga Asing														
						Kewaspadaan														
						Perbatasan Antar Negara														
						Fasilitasi Kelembagaan														
						Bidang Kewaspadaan														
						serta Penanganan														
						Konflik di Daerah														
9 (11 0 0	00.0.00.	8 N1	1 0 06	Pelaksanaan Forum	jumlah dokumen	18.0	1,665,911,256.67	100.0	0.0	6.0	523,789,600.0	546,794,600.0	6.0	532,042,896.0	100.0	97.30			
l lol		.0000			Koordinasi Pimpinan	Pelaksanaan Forum	10.0	1,003,311,230.07	100.0	0.0	0.0	323,763,000.0	340,734,000.0	0.0	332,042,890.0	100.0	97.30			
	25	.0000	υb	1																
					Daerah Provinsi	Koordinasi Pimpinan														
igspace				_ _		Daerah Provinsi														
1 1					Ì	jumlah dokumen	18.0		0.0		6.0			6.0		100.0		1		
						Pelaksanaan Forum														
					1	Koordinasi Pimpinan												l		l
						Daerah Provinsi									<u> </u>					
					Rata-Rata Capaian Kinerja											100.0	9.30			
					(%)															
					Predikat Kinerja															
8 (01 0.0	00.0.00.	x.xx		PROGRAM PENUNJANG	Persentase Realisasi	100.0	34,990,033,299.98	0.0	0.0	100.0	11,002,174,588.0	8,695,073,083.0	100.0	7,722,008,721.0	100.0	88.81			
			01		URUSAN PEMERINTAHAN	Kegiatan Perangkat	200.0	5.,550,005,255.50	5.0	3.0	200.0	12,002,17-,300.0	0,055,0.5,005.0	200.0	,,, 22,000,721.0	200.0	55.01	l		l
1 11	23	.5550			DAERAH PROVINSI	Daerah												1		
					DALIMAN PROVINCE	Dacidii														
\vdash	+		\vdash			Damantana ACA:	400 -				400 -			400 -		400 -				
					1	Persentase ASN	100.0		0.0		100.0			100.0		100.0		l		l
					1	Perangkat daerah												l		
						berkinerja Kategori Baik														
						dan Sangat Baik														
1 11																				
1 1 1	- 1		1 1		1													1	l	ı

				Persentase Penurunan Temuan berdasarkan	100.0		0.0		100.0			100.0		100.0			
				LHP													
8	.00.0.00 25.0000	1.0		% Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah Tepat Waktu	60.0	1,506,549,020.34	0.0	0.0	20.0	474,422,424.0	266,517,400.0	19.0	161,951,915.0	95.0	60.77		
8	.00.0.00 25.0000	1.0 01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan	6.0	676,158,068.45	100.0	0.0	2.0	213,334,000.0	96,352,000.0	2.0	50,088,903.0	100.0	51.99		
8	.00.0.00 25.0000	1.0 02 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	jumlah dokumen RKASKPD	3.0	207,861,382.09	0.0	0.0	1.0	65,355,000.0	55,198,000.0	1.0	16,056,122.0	100.0	29.09		
8	.00.0.00 25.0000	1.0 03 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	3.0	214,932,899.14	0.0	0.0	1.0	67,578,400.0	13,988,400.0	1.0	11,894,482.0	100.0	85.03		
8	.00.0.00 25.0000	1.0 04 1	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	jumlah dokumen penyusunan DPASKPD	3.0	35,017,272.08	0.0	0.0	1.0	11,010,000.0	9,800,000.0	1.0	9,272,326.0	100.0	94.62		
8	.00.0.00 25.0000	1.0 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	jumlah dokumen perubahan DPASKPD	3.0	31,963,994.95	0.0	0.0	1.0	10,050,000.0	8,840,000.0	1.0	8,546,082.0	100.0	96.68		
8	0.00.0.00 25.0000	1.0 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	63.0	301,306,050.83	0.0	0.0	21.0	94,735,524.0	78,754,500.0	21.0	62,509,500.0	100.0	79.37		
8	25.0000	1.0 07 1	Zevaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.0	39,309,352.80	0.0	0.0	1.0	12,359,500.0	3,584,500.0	1.0	3,584,500.0	100.0	100.0		
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100.0	10.95		
			Predikat Kinerja														

8 01	0.00.0.0 25.000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusnan Dokumen Iaporan Keauangan Tepat Waktu	60.0	24,345,684,600.73	0.0	0.0	20.0	7,654,679,292.0	6,295,451,381.0	20.0	6,107,998,424.0	100.0	97.02		
8 01	25.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.0	23,149,895,888.85	0.0	0.0	14.0	7,278,703,868.0	6,051,900,981.0	14.0	5,877,095,721.0	100.0	97.11		
8 01	25.000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.0	174,768,310.70	0.0	0.0	1.0	54,950,000.0	54,950,000.0	1.0	54,698,000.0	100.0	99.54		
8 01	25.000		Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	jumlah laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	36.0	103,205,219.68	0.0	0.0	6.0	32,449,400.0	22,399,400.0	6.0	21,555,018.0	100.0	96.23		
8 01	0.00.0.0 25.000		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36.0	61,580,783.11	0.0	0.0	12.0	19,362,000.0	1,800,000.0	12.0	910,000.0	100.0	50.56		
8 01	25.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36.0	174,590,202.87	0.0	0.0	2.0	54,894,000.0	44,559,000.0	2.0	34,084,000.0	100.0	76.49		
8 01	25.000		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	36.0	2,633,451.52	0.0	0.0	1.0	828,000.0	828,000.0	1.0	818,433.0	100.0	98.84		
8 01	0.00.0.0 25.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulananSemest eran SKPD	jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	36.0	491,316,893.45	0.0	0.0	12.0	154,478,024.0	114,950,000.0	12.0	114,863,000.0	100.0	99.92		
8 01	25.000		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	36.0	187,693,850.55	0.0	0.0	1.0	59,014,000.0	4,064,000.0	1.0	3,974,252.0	100.0	97.79		
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100.0	11.20		
8 01	25.000		Predikat Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah persentase administrasi barang milik daerah yang terdata dengan baik	60.0	132,281,641.40	0.0	0.0	20.0	41,591,500.0	33,873,366.0	20.0	26,020,252.0	100.0	76.82		
8 01	25.000		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.0	57,636,966.82	0.0	0.0	1.0	18,122,000.0	9,188,000.0	1.0	1,615,236.0	100.0	17.58		

			1			1					-	1						1		
8 (00.0.00.	X.XX.	1.0 05	Rekonsiliasi dan	jumlah dokumen	3.0	74,644,674.58	0.0	0.0	1.0	23,469,500.0	24,685,366.0	1.0	24,405,016.0	100.0	98.86			
	2	25.0000	01	3	Penyusunan Laporan	Rekonsiliasi dan														
					Barang Milik Daerah pada	Penyusunan Laporan														
					SKPD	Barang Milik Daerah														
						pada SKPD														
+	+		-	\vdash	Bata Bata Canaian Kinosia	pada SKI B										66.67	19.41		+	
					Rata-Rata Capaian Kinerja											00.07	19.41			
	_				(%)															
$\perp \! \! \perp$	┸				Predikat Kinerja															
8 (01 0.	00.0.00.	x.xx.	1.0	Administrasi Kepegawaian	Rata-rata Nilai Prilaku	60.0	1,517,778,668.92	0.0	0.0	20.0	490,438,024.0	268,607,000.0	20.0	197,569,246.0	100.0	73.55			
	2	25.0000	01	5	Perangkat Daerah	Pegawai Prangkat														
						Daerah Berdasarkat														
						Penilaian Kinerja														
						· ca.a kanenja														
\rightarrow	+																			
8 (00.0.00.			Pengadaan Pakaian Dinas	jumlah baju	174.0	324,140,352.77	0.0	0.0	58.0	101,915,000.0	48,565,000.0	58.0	48,565,000.0	100.0	100.0			
	2	25.0000	01	5	Beserta Atribut															
					Kelengkapannya															
8 (01 0	00.0.00.	X.XX.	1.0 03	Pendataan dan	jumlah dokumen	36.0	151,266,066.21	0.0	0.0	12.0	47,560,512.0	39,570,000.0	9.0	39,280,526.0	75.0	99.27	İ		
		25.0000	01	5	Pengolahan Administrasi	,	55.0	151,200,000.21	0.0	0.0	0	.,,505,512.0	33,3.3,000.0	3.0	33,233,320.0	. 3.0	33.27		1	
	1	.5.0000	01	3	-														1	
					Kepegawaian															
\bot	_		!	\vdash														ļ	-	
8 (00.0.00.	X.XX.		Monitoring Evaluasi dan	jumlah dokumen	36.0	138,232,389.46	0.0	0.0	12.0	43,462,512.0	35,472,000.0	12.0	35,203,720.0	100.0	99.24			
	2	25.0000	01	5	Penilaian Kinerja Pegawai															
8 (01 0.	00.0.00.	X.XX.	1.0 09	Pendidikan dan Pelatihan	jumlah dokumen	3.0	146,302,862.46	0.0	0.0	1.0	46,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
11		25.0000	01	5	Pegawai Berdasarkan	Pendidikan dan		,,				,,								
	-	23.0000	01	,	-															
					Tugas dan Fungsi	Pelatihan Pegawai														
						Berdasarkan Tugas dan														
						Fungsi														
8 (01 0.	00.0.00.	X.XX.	1.0 10	Sosialisasi Peraturan	jumlah orang yang	300.0	686,275,815.29	0.0	0.0	100.0	229,000,000.0	145,000,000.0	100.0	74,520,000.0	100.0	51.39			
	2	25.0000	01	5	PerundangUndangan	mengikut sosialisasi														
						Peraturan Perundang-														
						undangan														
0 /	01 0	00.0.00.	X.XX.	1 0 11	Dischingen Televie		30.0	71 FC1 102 72	0.0	0.0	10.0	22 500 000 0	0.0	2.0	0.0	20.0				
١٥١				5	Bimbingan Teknis	jumlah orang yang	30.0	71,561,182.73	0.0	0.0	10.0	22,500,000.0	0.0	2.0	0.0	20.0			1	
	2	25.0000	01	5	Implementasi Peraturan	mengikuti Bimbingan													1	
				1 1	PerundangUndangan	Teknis Implementasi													1	
						Peraturan Perundang-														
				1 1		undangan													1	
	ı				Rata-Rata Capaian Kinerja											35.91	5.30			
					(%)															
+					Predikat Kinerja		-												1	
	01 C	00.0.00.	v vv	1.0		9/ nomonuhan	60.0	4,632,106,544.48	0.0	0.0	20.0	1,463,021,512.0	1,067,483,500.0	20.0	644,502,940.0	100.0	60.38	†	1	
۱۹۱					Administrasi Umum	% pemenuhan	60.0	4,032,100,344.48	0.0	0.0	20.0	1,403,021,512.0	1,007,463,500.0	20.0	044,502,940.0	100.0	00.38		1	
	2	25.0000	01	6	Perangkat Daerah	Administrasi Umum													1	
			<u> </u>			Kantor														
8 (01 0.	00.0.00.	X.XX.	1.0 01	Penyediaan Komponen	jumlah jenis komponen	3.0	27,384,079.26	0.0	0.0	1.0	8,610,000.0	8,610,000.0	1.0	8,570,000.0	100.0	99.54			
	2	25.0000	01	6	Instalasi ListrikPenerangan	Instalasi Listrik														
				1 1	Bangunan Kantor	Penerangan Bangunan													1	
				1 1		Kantor													1	
1	+	00 0			n 11 F			450				,	,		,		0	ļ	+	
8 (O 2 O.	00.0.00.	X.XX.	1.0 02	Penyediaan Peralatan dan	jumlah penyediaan	9.0	150,316,649.69	0.0	0.0	3.0	47,262,000.0	47,262,000.0	3.0	46,634,999.0	100.0	98.67			
	2	25.0000	01	6	Perlengkapan Kantor														1	
			1																1	
				1 1															1	
						l														

8 01	0.00.0 25.00	0.00. X.X		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.0	301,562,004.50	0.0	0.0	2.0	94,816,000.0	77,800,000.0	2.0	62,060,000.0	100.0	79.77		
8 01	0.00.0 25.00			Penyediaan BahanMaterial	jumlah jenis bahan material	30.0	242,544,701.98	0.0	0.0	10.0	76,260,000.0	64,860,000.0	10.0	57,480,000.0	100.0	88.62		
8 01	0.00.0 25.00		08 F	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah jenis Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.0	786,175,924.16	0.0	0.0	1.0	247,186,500.0	197,332,500.0	1.0	179,607,500.0	100.0	91.02		
8 01	0.00.0 25.00	0.00. X.X	ŀ	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.0	2,622,204,142.83	0.0	0.0	32.0	831,075,500.0	533,818,000.0	32.0	187,581,515.0	100.0	35.14		
8 01	0.00.0 25.00			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0.0	60,178,183.93	0.0	0.0	100.0	18,921,000.0	6,901,000.0	100.0	6,768,926.0	100.0	98.09		
8 01	0.00.0 25.00	0.00. X.X	S	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36.0	441,740,858.13	0.0	0.0	12.0	138,890,512.0	130,900,000.0	12.0	95,800,000.0	100.0	73.19		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											72.73	7.55		
			F	Predikat Kinerja														
8 01	0.00.0 25.00	000 X.X		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.0	714,963,960.01	0.0	0.0	20.0	224,796,300.0	105,594,900.0	20.0	105,502,900.0	100.0	99.91		
8 01	0.00.0		05 F	Pengadaan Mebel	jumlah Pengadaan Mebel	15.0	76,331,928.24	0.0	0.0	2.0	24,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
8 01	0.00.0 25.00	0.00. X.X 000 0:		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.0	638,632,031.77	0.0	0.0	29.0	200,796,300.0	105,594,900.0	29.0	105,502,900.0	100.0	99.91		
			(Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											20.0	9.99		
			_	Predikat Kinerja														
[8 01		000. X.X	F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.0	562,348,561.58	0.0	0.0	20.0	176,811,536.0	183,671,536.0	20.0	141,091,936.0	100.0	76.82		
8 01	0.00.0 25.00	0.00. X.X	ŀ	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	3.0	57,248,946.18	0.0	0.0	3.0	18,000,000.0	18,000,000.0	3.0	11,124,400.0	100.0	61.80		
8 01	0.00.0 25.00	0.00. X.X		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.0	142,613,485.93	0.0	0.0	20.0	44,840,000.0	51,700,000.0	20.0	15,996,000.0	100.0	30.94		

8 (01 0	00 0 00	V VV	1 0 0	Penyediaan Jasa	jumlah dokumen	36.0	362,486,129.47	0.0	0.0	12.0	113,971,536.0	113,971,536.0	12.0	113,971,536.0	100.0	100.0		1	
ľľ					*	Penyediaan Jasa	30.0	302,400,123.47	0.0	0.0	12.0	113,571,330.0	113,371,330.0	12.0	113,371,330.0	100.0	100.0			
	1	23.0000	01	٥	*	Pelayanan Umum Kantor														
						relayallali Olliulli Kalitoi														
	T				Rata-Rata Capaian Kinerja											75.0	16.06			
					(%)															
					Predikat Kinerja															
8 (01 0.	00.0.00.	x.xx.	1.0	Pemeliharaan Barang	% Barang Milik Daerah	60.0	1,578,320,302.52	0.0	0.0	20.0	476,414,000.0	473,874,000.0	18.0	337,371,108.0	90.0	71.19			
	1 2	25.0000	01	9	Milik Daerah Penunjang	Penunjang urusan														
					Urusan Pemerintahan	Pemerintah Daerah														
					Daerah	dalam Kondisi Baik														
8 (01 0.	00.0.00.	X.XX.	1.0 01	Penyediaan Jasa	jumlah Penyediaan Jasa	18.0	1,400,258,335.61	0.0	0.0	6.0	440,264,000.0	436,224,000.0	6.0	305,371,108.0	100.0	70.0			
	2	5.0000	01	9	Pemeliharaan Biaya	Pemeliharaan Biaya														
					Pemeliharaan dan Pajak	Pemeliharaan dan Pajak														
					Kendaraan Perorangan	Kendaraan Perorangan														
					Dinas atau Kendaraan	Dinas atau Kendaraan														
					Dinas Jabatan	Dinas Jabatan														
						jumlah Penyediaan Jasa	51.0		0.0		17.0			17.0		100.0				
						Pemeliharaan Biaya														
						Pemeliharaan dan Pajak														
						Kendaraan Perorangan														
						Dinas atau Kendaraan														
						Dinas Jabatan														
8 (01 0.	00.0.00.	X.XX.	1.0 06	Pemeliharaan Peralatan	jumlah pemeliharaan	30.0	114,974,966.91	0.0	0.0	10.0	36,150,000.0	37,650,000.0	10.0	32,000,000.0	100.0	84.99		1	
[]			01			Peralatan dan Mesin	22.0	,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2.0	3.0		22,223,000.0	2.,222,000.0]	2=,222,00010		233			
	1	22.2300				Lainnya														
					Rata-Rata Capaian Kinerja											42.86	12.92			
					(%)															
					Predikat Kinerja															

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mengukur kinerja, indikator yang digunakan adalah indikator sasaran strategis dan indikator kegiatan 2021. Indikator Kinerja sasaran strategis adalah yang menggambarkan tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja. Indikator kinerja kegiatan terdiri dari indikator input, output dan outcome untuk setiap kegiatan. Selanjutnya setiap indikator kinerja ditetapkan satuan, rencana dan realisasinya. Dari perbandingan antara rencana dan realisasi tersebut dihasilkan capaian kinerja.

Untuk Laporan Kinerja Tahun 2021, pengukuran kinerja keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan memanfaatkan data base kinerja. Data base kinerja ini diperoleh melalui pengumpulan data kinerja 2 sumber yaitu :

- Data internal yang diperoleh oleh masing-masing Bidang dan Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2. Data eksternal yang berasal dari luar lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Hingga akhir tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan Rencana Strategis pada Tahun ke-3 yaitu tahun 2021. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

Adapun pengukuran ke 3 sasaran strategis tersebut sebagai tolok ukur keberhasilan adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keamanan dan ketenteraman	Jumlah Konflik Sosial yang	110
	masyarakat	berhubungan dengan kesatuan	
		bangsa dan politik	
2.	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia di	Nilai Indeks Demokrasi	71,29
	Sulawesi Selatan	Indonesia di Sulsel	
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja,	- Nilai SAKIP OPD	90
	perencanaan dan pengelolaan keuangan	- Rata-rata Capaian Kinerja	95
	perangkat daerah	Perangkat Daerah (Evaluasi	
		Dokumen Perencanaan)	

- Persentase ASN Nilai SKP	100
Kategori baik	
- Nilai Temuan Material LHP (%)	100%

2.2.1. Sasaran meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat

2.2.1.1 Analisis capaian Kinerja Analisa Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-1, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
STRATEGIS			2021	CAPAIAN	CAPAIAN
				KINERJA	
Meningkatnya		Jumlah Konflik Sosial	110	21	523.8%
keamanan	dan	yang berhubungan dengan kesatuan			
ketenteraman		bangsa dan politik			
masyarakat					

Sumber Data: Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Untuk tahun 2020 target pada sasaran ini sebesar 110 Jumlah Konflik Sosial yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik akan tetapi sampai dengan akhir 2021 badan kesatuan bangsa dan politik berhasil menekan sehingga hanya terjadi 21 kasus Jumlah Konflik Sosial yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik dengan persentase capaian target hanya 523.8 % hasil ini didapat dari target 2021 dibagi realisasi capaian kinerja rumus ini dipakai dikarenakan metode yang ada di kesbangpol < target dinyatakan bagus.

2.2.1.2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indicator kinerja	Satuan	Target akhir	Realisasi	Tingkat
		RPJMD/RENSTRA	2021	pencapaian
Jumlah Konflik Sosial				
yang berhubungan	Kasus	420	21	2000%
dengan kesatuan				
bangsa dan politik				

Sumber Data: Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul-Sel

Sesuai dengan table diatas badan kesatauan bangsa dan politik berhasil meningkatkan kemanan dan ketentraman masyarakat terbukti dengan berhasil menekan Jumlah Konflik Sosial yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik (sebagai indicator). dimana target akhir rpjmd/ renstra sebesar 420 kasus berhasilkan di tekan untuk tahun ini hanya 21 kasus dengan tingkat pencapaian 2000 % hasil ini didapat dari target akhir RPJMD/RENSTRA dibagi realisasi 2021 rumus ini dipakai dikarenakan metode yang ada di kesbangpol < target dinyatakan bagus.

2.2.1.3 Analisis Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi	Standar	Capaian
		kinerja		2021	nasional	
1.	Meningkatnya	Jumlah Konflik				-
	keamanan dan	Sosial yang	Kasus	21		
	ketentaraman	berhubungan				
	Masyarakat	dengan kesatuan				
		bangsa dan				
		politik				

Sumber Data: Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan table diatas Realisasi kinerja sasaran ini belum bisa dibandingkan dengan standar nasional, hal ini disebabkan untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik belum ada standar nasional maupun SPM, sehingga belum dapat dibandingkan.

2.2.1.4. Analisa Faktor Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi factor pendukung yang menyebabkan keberhasilan sebagai berikut:

- terciptanya koordinasi yang baik dengan semua stakeholder antara lain TNI,POLRI, dan Badan Intelijen Daerah.
- Dukungan dari pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Badan Kesbangpol Kab/Kota.



Ket: kepala badan kesbangpol melakukan Rapat dengan kepala BNN terkait Ranperda P4GN



Ket : Badan kesatuan bangsa dan politik menerima kunjugan Ormas



Ket: Badan kesatuan bangsa dan politik melakukan rapat komida dengan stakeholder



Ket: Badan kesatuan bangsa dan politik menerima aspirasi dari mahasiswa



Ket: Rakornas Bakesbangpol di Sulawesi selatan yang dihadiri plt. Gubernur sulsel terkait koloboratif , kreatif dan inofatif



Ket : Badan kesatuan bangsa dan poltik melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Bakesbangpol kab/kota

2.2.1.5. Analisis Capaian Kinerja atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

No	Sasaran	%	%Penyerapan	%Tingkat
		Capaian	anggaran	efisiensi
		kinerja		
1.	meningkatnya keamanan dan ketentaraman masyarakat	100 %	82.13%	17.87%

Sumber Data: Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Keterengan:

Jika %capaian Kinerja<100% maka % capaian kinerja-%penyerapan anggaran.

Jika% capaian kinerja>= 100% maka 100% - %penyerapan anggaran.

Berdasarkan table diatas Badan kesatuan bangsa dan politik mendapatkan penyerapan anggaran sebesar 82.17% dengan capian kinerja sebesar 100 % sehingga tingkat efisiensi pada Bakesbangpol mendapatkan persentase sebesar 17.87%.

2.2.1.6. Analisa Program/ Kegiatan dalam pencapaian kinerja

No.	Program	Jumlah Dana	Realisasi Keuangan	%	Capaian
				keuangan	kinerja
1.	program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Rp. 8,695,073,083	Rp. 7,722,008,721	88,81	100 %
2.	program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Rp. 168,493,630	Rp. 88,268,130	52,39	75 %
3.	program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Rp. 6,986,849,456	Rp. 6,686,535,917	95,70	99.73 %
4.	program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Rp. 140,728,600	Rp. 129,899,408	92,30	125%
5.	program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Rp. 1,505,441,400	Rp. 1,427,380,821	94,81	100 %
6.	program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Rp. 2,321,545,100	Rp. 2,067,332,883	89,05	100%
	Jumlah	Rp.19,818,131,269	Rp.18,121,425,880	91,44	100

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan tabel diatas ada 6 program penunjang yang meningkatkan sasaran strategis meningkatnya keamanan dan ketentraman masyarakat dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% Dalam mencapai target pada sasaran ini, semua program yang ada secara bersama-sama menunjang tercapainya target yang telah ditentukan. Adapun program yang paling berperan dalam pencapaian target sasaran ini adalah

program peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, program pemeliharaan ketenteraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. Secara keseluruhan pencapaian sasaran meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat dapat tercapai dengan baik pada tahun 2021 ini. Semua potensi konflik yang ada pada tahun 2021 dapat ditangani dengan baik melalui koordinasi dengan stakeholder terkait terutama Badan Intelijen Daerah, TNI, dan POLRI dan Masyarakat di Sulawesi Selatan.

2.2.1.7. Analisis Capaian Kinerja Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indicator	satuan	Target	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Jumlah Konflik Sosial yang	Kasus	110	80	21
berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik				

Sumber Data: Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Berdasarkan table diatas perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, untuk analisis ini pada badan kesatuan bangsa dan politik berhasil menekan angka kasus jumlah konflik social yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik yang satuannya kasus dan berhasil menekan sebanyak 21 kasus.

2.2.2. Sasaran strategis meningkatnya indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan 2.2.2.1. Analisis capaian Kinerja Analisa Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indicator kinerja	Target	Realisasi	% capaian
Nilai indeks demokrasi	71,79	73,43	102,28
Indonesia di Sulawesi			
selatan			

Sumber data: Badan Pusat Statistik

Sesuai dengan table diatas tahun 2021 badan kesatuan bangsa dan politik menargetkan nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan sebesar 71,79 akan tetapi sampai dengan akhir 2021 indeks demokrasi indonesia di sulawesi selatan

berdasarakan data BPS tercatat sebesar 73,43 yang artinya target tersebut tercapai sebesar 102,28.

2.2.2.2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indicator kinerja	Satuan	Target akhir	Realisasi	Tingkat
		RPJMD/RENSTRA	2021	pencapaian
Nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan	Angka	71,79	73,43	102,28

Sumber data: Badan Pusat Statistik

Sesuai dengan table diatas akhir rpjmd/renstra badan kesatuan bangsa dan politik menargetkan nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan sebesar 71,79 akan tetapi sampai dengan akhir 2021 indeks demokrasi indonesia di sulawesi selatan berdasarakan data BPS tercatat sebesar 73,43 yang artinya target tersebut tercapai sebesar 102,28.

2.2.2.3. Analisis Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Indicator	Satuan	Realisasi	Standar	Capaian	
NO	Sasaran	Kinerja		2020	Nasional	Сараіан	
1.	meningkatnya nilai	Nilai indeks	Angka	73,43	73,66	99,68%	
	indeks demokrasi	demokrasi					
	Indonesia di	di Sulawesi					
	Sulawesi selatan	selatan					

Sumber data: Badan Pusat Statistik

Sesuai dengan tabel diatas Nilai IDI di Sulawesi selatan sebesar 73,43 dibandingkan dengan IDI (Nasional) sebesar 73.66, IDI Sulawesi selatan mendapatkan capian sebesar 99,68% itu artinya cukup baik karena di atas 90%.

2.2.2.4. Analisa Faktor Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi

Factor pendukung yang menyebabkan keberhasilan sebagai berikut:

- Terciptanya koordinasi yang baik dengan semua stakeholder terkait dengan demokrasi antara lain LSM, Partai Politik, Media Cetak, Media Elektornik
- Dukungan dari pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Badan Kesbangpol Kab/Kota



Ket: Plt gubernur bersama bakesbangpol prov. Sulsel melakukan pertemuan dengan petinggi Partai politik



Ket : plt gubernur dan bakesbang meberikan bantuan hibah kepada partai politik



Ket : Bakesbangpol melakukan rapat dengan insan PERS dan LSM



Ket: Bakesbangpol melakukan rapat dengan seluruh Kab/kota terkait kegiatan pemetaan dan monitoring kondisi politik



Ket : kepala badan kesbangpol menghadiri kegiatan partai poltik

2.2.2.5. Analisis Capaian Kinerja atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

	Sasaran	% Capaian	%Penyerapan	%Tingkat
		kinerja	anggaran	efisiensi
1.	meningkatnya nilai			
	indeks demokrasi	102,28%	95,70%	6,58 %
	Indonesia di Sulawesi			
	selatan.			

Sumber data: Badan Pusat Statistik

Keterengan:

Jika %capaian Kinerja<100% maka % capaian kinerja-%penyerapan anggaran Jika% capaian kinerja>= 100% maka 100% - %penyerapan anggaran.

Berdasarkan table diatas Badan kesatuan bangsa dan politik mendapatkan penyerapan anggaran sebesar 95,70 dengan capian kinerja sebesar 102,28% sehingga tingkat efisiensi pada Bakesbangpol mendapatkan persentase sebesar 6,58%

2.2.2.6. Analisa Program/ Kegiatan dalam pencapaian kinerja

No.	Program	Jumlah Dana	Realisasi Keuangan	%	Capaian
				keuangan	kinerja
1.	program peningkatan	Rp. 6,986,849,456	Rp. 6,686,535,917	95,70	99.74 %
	peran partai politik dan				
	lembaga pendidikan				
	melalui pendidikan politik				
	dan pengembangan etika				
	serta budaya politik				

Sumber data: Badan Pusat Statistik

Sesuai pada tabel di atas untuk mendukung sasaran pada Indeks Demokrasi Indonesia terdapat 1 program dan 4 indikator yang menunjang untuk terjadinya peningkatan IDI sesuai realisasi keuangan sebesar Rp. 6,686,535,917 atau 95.70 %, dengan tingkat capaian kinerja 99.74 % sehingga program tersebut berjalan sesuai dengan sasaran yang diinginkan untuk mencapai target.

2.2.2.7. Analisis Capaian Kinerja Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indicator		Satuan	Target	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Nilai	indeks	Angka	71.79	70.58	73,43
demokrasi	di				
Sulawesi selatan					

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel diatas perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir badan kesatuan bangsa dan politik menunjukkan bahwa target di atas sebesar 71,79 dengan realisasi 2020

sebesar 70,58 dan realisasi 2021sebesar 73,43 tabel ini menunjukkan terdapat peninkatan IDI di Sulawesi Selatan.

2.2.3. Sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.

2.2.3.1. Analisis capaian Kinerja Analisa Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indicator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai SAKIP OPD	90	74,05	82.27 %
Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%
(Evaluasi Dokumen Perencanaan)			
Persentase ASN Nilai SKP Kategori baik	100 %	100 %	100%
Temuan material LHP	100 %	100%	100%

Sumber Data: Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul-Sel

Sesuai dengan table diatas pada tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menargetkan mendapat poin 90 untuk Nilai sakip Opd akan tetapi sampai dengan akhir 2021 hasil evaluasi inspektorat provinsi Sulawesi selatan terhadap Sakip Bakesbangpol tahun 2019 mendapat poin 74,08 ini artinya badan kesatuan bangsa politik berhasil mencapai target sebesar 82.27%.

Sedangkan untuk indikator ke 2 yaitu Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) ditargetkan tercapai sebesar 100% dan sampai dengan akhir 2021 seluruh capaian kinerja berhasil terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian 100%.

Sedangkan untuk indikator ke 3 yaitu Persentase ASN Nilai SKP Kategori baik pada badan kesatuan bangsa dan politik yang di targetkan sebesar 100% dan sampai akhir 2021 Asn Berkategori Baik sebesar 100% yang artinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berhasil mencapai target sebesar 100%, Indikator ke 4 yaitu temuan material Lhp pada badan kesatuan bangsa dan politik di targetkan sebesar 100% dan sampai akhir 2021 memperoleh target sebesar 100%.

2.2.2.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indicator kinerja	Satuan	Target akhir	Realisasi	Tingkat
		RPJMD/RENSTRA	2021	pencapaian
Nilai SAKIP OPD	Nilai	100	74,05%	74,05%
Rata-rata Capaian	Persentase	100%	100 %	100 %
Kinerja Perangkat				
Daerah (Evaluasi				
Dokumen				
Perencanaan				
Persentase ASN Nilai	Persentase	100%	100%	100%
SKP Kategori terbaik				
Temuan material LHP	persentase	100%	100%	100%

Sumber Data: Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengaan table diatas akhir rpjmd/renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menargetkan mendapat poin 100 untuk Nilai sakip Opd akan tetapi sampai dengan akhir 2021 hasil evaluasi inspektorat provinsi Sulawesi selatan terhadap Sakip Bakesbangpol tahun 2021 mendapat poin 74,05 ini artinya badan kesatuan bangsa politik berhasil mencapai target sebesar 74,05%.

Sedangkan untuk indikator ke 2 yaitu Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) ditargetkan akhir Rpjmd/Renstra tercapai sebesar 100% dan sampai dengan akhir 2021 seluruh capaian kinerja berhasil terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian 100%.

Sedangkan untuk indikator ke 3 yaitu Persentase ASN Nilai SKP Kategori baik pada badan kesatuan bangsa dan politik yang di targetkan akhir Rpjmd/Renstra sebesar 100% dan sampai akhir 2021 Asn Berkategori Baik sebesar 100% yang artinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berhasil mencapai target sebesar 100%.

Sedangkan pada indicator ke 4 yaitu temuan material lhp yang ditargetkan pada akhir Rpjmd/Renstra sebesar 100% dan sampai akhir 2021 temuan material Lhp pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mencapai target sebesar 100%.

2.2.3.3. Analisis Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Indicator Kinerja	Satuan	Realisasi	Standar	Capa
				2021	Nasional	ian
1.	Meningkatnya	1. Nilai SAKIP OPD	Persentase	74,05		
	akuntabilitas	2. Rata-rata Capaian Kinerja		100		
	kinerja,	Perangkat Daerah (Evaluasi				
	Perencanaan	Dokumen Perencanaan				
	dan pengelolaan	3. Persentase ASN Nilai SKP				
	keuangan	Kategori terbaik		100		
	perangkat	4. Temuan Material Lhp				
	daerah			100		

Sumber Data: Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan table diatas Realisasi kinerja sasaran ini belum bisa dibandingkan dengan standar nasional, hal ini disebabkan untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik belum ada standar nasional maupun SPM, sehingga belum dapat dibandingkan.

2.2.3.4. Analisa Faktor Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi

Factor pendukung yang menyebabkan keberhasilan sebagai berikut:

- Sarana dan Prasarana, Penerapan penilaian kinerja kehadiran dengan Berbasis IT
 (e-rkbmd, e-planning, e-budgeting) serta pelaporan kinerja yang tepat waktu.
- Dukungan dari ASN Bakesbangpol untuk meningkatkan kinerja sangat baik dalam peningkatan disiplin.



Ket: kepala badan kesbangpol memberikan arahan terkait pengisian Skp 2021



Ket : Kepala badan kesatuan bangsa dan politik memberikan arahan dan motivasi kepada eselon 3 dan 4 serta staff





2.2.3.5. Analisis Capaian Kinerja atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

No	Sasaran	% Capaian	%Penyerapan	%Tingkat Efisiensi
		Kinerja	Anggaran	
1.	Meningkatnya	100	88,81	11,19
	akuntabilitas			
	kinerja,			
	Perencanaan dan			
	pengelolaan			
	keuangan			
	perangkat daerah			

Sumber Data: Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Keterengan:

Jika %capaian Kinerja<100% maka % capaian kinerja-%penyerapan anggaran Jika% capaian kinerja>= 100% maka 100% - %penyerapan anggaran

Berdarkan tabel diatas Badan kesatuan bangsa dan politik mendapatkan penyerapan anggaran sebesar 88,81 % dengan capian kinerja sebesar 100% sehingga tingkat efisiensi pada Bakesbangpol mendapatkan persentase sebesar 11,19%.

2.2.3.6. Analisa Program/ Kegiatan dalam pencapaian kinerja

No.	Program	Jumlah Dana	Realisasi	%	%
			Keuangan	keungan	capaian
1.	program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Rp. 8,695,073,083	Rp. 7,722,008,721	88,81	100 %

Sumber Data: Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul-Sel

Sesuai pada tabel realisasi keuangan di atas untuk mendukung sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah terdapat 1 program untuk mendukung tercapainya suatu target yang ingin dicapai sesuai pada table di atas kita dapat melihat persentase keuangan yang rata-rata tidak mencapai target dikarenakan anggaran pada badan pengelolaan keuangan dan asset daerah tidak mengcukupi untuk membayarkan kegiatan tersebut dikarenakan mengalami pengeseran anggaran selama pada masa pandemic covid 19. tapi tingkat capaian kinerja pada table diatas menunjukkan persentase capaian sebesar 100%.

2.2.3.7 Analisis Capaian Kinerja Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	Indicator	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi
				2020	2021
1.	Nilai SAKIP OPD	Nilai	90	73,38	74,05
2.	Rata-rata Capaian Kinerja	Persentase	100%	100%	100%
	Perangkat Daerah				
	(Evaluasi Dokumen				
	(Perencanaan)				
3.	Persentase ASN Nilai SKP		100%	100%	100%
	Kategori terbaik				
4.	Temuan Material Lhp		100%		100%

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Berdasarkan table diatas perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir badan kesatuan bangsa dan politik menunjukkan bahwa pada tahun 2020 rata-rata pencapaian diatas 73-100 % dan realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan dengan pencapaian sebesar 74-100 % sehingga saat ini bakesbangpol sangat tercapai jika dibanding dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan pada nilai sakip sebesar 0,67 dan pada indicator ke 4 telah terjadi penambahan indicator oleh Menpan Rb pada saat melakukan Coching Clinik sehingga pada tahun 2020 tidak terdapat realisasi sesuai table di atas, tetapi badan kesatuan bangsa dan politik mendapat cukup baik dalam hal melaksanakan seluruh capaian kinerja pada tahun ini.

Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2019-2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel, maka pada tahun anggaran 2021 telah dialokasikan anggaran dari dana APBD Prov. Sulsel dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 19,818,131,269,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18,121,425,880.0 (91.44%), Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut: Rincian Anggaran Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi antara lain: Belanja Pegawai, Belanja Barang jasa dan Belanja Hibah kemudian Belanja Modal terdiri dari: Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebelum dan setelah perubahan. Selanjutnya, terdapat DPPA untuk Belanja Daerah sehingga rincian anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel berubah menjadi

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)		Bertambah/Berkurang	
	Sebelum Perubahan Setelah Perubahan		(Rp)	%
Belanja Daerah	24.196.934.068,00	19.818.131.269,00	(4.378.802.799,00)	(18,10)
Belanja Operasi	23.671.917.268,00	19.502.900.869,0	(4.169.016.399,00)	(17,61)
Belanja Modal	525.016.800,00	315.230.400,00	(209.786.400,00)	(39,96)

Belanja Daerah berupa belanja operasi dan belanja modal dengan alokasi satu tahun anggaran dan telah teralisasi Rp18,121,425,880,- atau 91,44% dari jumlah alokasi belanja daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 19.818.131.269,00 Dibandingkan dengan tahun 2020 capaian realisasi keuangan untuk belanja tidak langsung sebesar 98,15% maka tahun ini terjadi perbaikan dengan meningkatnya realisasi capaian keuangan belanja tidak langsung. Pada dokumen anggaran perubahan, belanja Operasi Berkurang sebesar Rp 4.378.802.799,00 hal ini disebabkan penyesuaian terhadap adanya rasionalisasi anggaran belanja Operasi pada tahun 2021.

Realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2021 sebesar Rp Rp18,121,425,880,- atau 91.44% dan dari anggaran tersebut memiliki sisa dana yang belum teralisasi sebesar Rp. 1,696,705,389.00. Jika dibandingkan tahun 2020 terjadi penurunan tingkat capaian realisasi keuangan, dengan tingkat capaian tahun 2020 sebesar 87,90%.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Renstra 2018-2023 Bakesbangpol Prov. Sulsel menetapkan isu strategis yaitu Sulsel aman, damai dan demokratis dari beberapa pertimbangan yang di telaah seperti

Aspek Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan Permasalahan Strategis. Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi selatan sangat besar karena berpengaruh terhadap kondisi IPOLEKSOSBUDHUKAM yang berimplikasi terhadap stabilitas daerah sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan ujung tombak dari seluruh sector pembangunan dan merupakan salah satu tiang / pilar utama untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam memelihara persatuan dan kesatuan demi tegaknya Negara Kesatuahn Republik Indonesia, hal ini juga berdasarkan Undang – Undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Melaksanakan tugas Pemerintahan Umum, absolute dan kongkuren.

Peluang yang memberi dukungan terhadap kinerja pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

- 1. Masih Tingginya semangat persatuan dimasyarakat untuk menjadi suatu bangsa.
- 2 Adanya pemahaman dan pengertian yang sama diantara elit di provinsi sulsel untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat.
- 3. Banyak nya lembaga independen yang mampu melakukan pengawasandan kontrol terhadap program dan pembangunan.

Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

- 1. Terdapatnya potensi konflik vertikal dan horizontal dari aspek IPOLEKSOSBUDHUKAM.
- 2. Masih tingginya angka kemiskinan dan penganguran serta instabilitas harga komoditas pangan.
- 3. Masih tingginya ketimpangan antar masyarakat dan antara daerah pedesaan dan perkotaan, golongan umur dan jenis kelamin.
- 4. Terdapatnya gejala politisasi nilai–nilai agama dan kepercayaan.
- 5. Tranformasi teknologi industry dan komunikasi.
- 6. Menguatnya sikap primordialisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan merebaknya isu putra daerah dalam pengisian jabatan—jabatan strategis dilingkungan pemerintahan daerah.
- Masihadanya penggunaan cara
 – cara penyampaian pendapat yangmengabaikan /
 melecehkan symbol
 –symbol Negara, bahkan ada yang cenderung anarkis dan serta
 masih adanya kecenderungan lebihmementingkan kepentingan kelompok dari pada
 kepentingan umum.

- 8. Melemahnya wawasan kebangsaan yang ditandai oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arti nasionalisme dan wawasan kebangsaan.
- 9. Meningkatnya paham radikalisme ditengah masyarakat.

Setelah diadakan analisis terhadap gambaran pelayanan SKPD, memiliki sejumlah permasalahan dan hambatan yang timbul dalam rangka melaksanakan visi dan misi kepala daerah di dapat sejumlah isu – isu penting dan merupakan isu – isu strategis yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah tergambar dalam table berikut:

No	Aspek Permasalah an Pelayanan PD	Permasalahan Strategis	Telahaan Renstra	Telahaan Visi, Misi dan Program KD dan Wakil KD Terpilih	Telahaan RTRW/K LHS	Isu- isu Strategis
1.	Permasalahan dalam Bidang IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAA AN DAN KARAKTER BANGSA	 Menguatnya sikapprimordialis me dalam penyelenggaraa n pemerintahan, dan merebaknya isu putra daerah dalam pengisian jabatan—jabatan strategis dilingkungan pemerintahan daerah Masih ada nya penggunaan cara—cara penyampaian pendapat yang mengabaikan/ melecehkan symbol—symbol Negara, bahkan ada yang cenderung 	Kualitas Keama n, Perdam aian dan demokr asi harus selalu berada di zona hijau	Visi : Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter Misi 4 Mewujudkan Kualitas Manusia yang kompetitif, inklusif dan Berkarakter		Sulsel aman, damai dan demokr atis

		anarkis dan serta masih adanya kecenderungan lebih mementingkan kepentingan kelompok dari pada kepentingan umum
		3. Melemahnya wawasan kebangsaan yang ditandai oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arti nasionalisme dan wawasan kebangsaan
		4. Meningkatnya paham radikalisme ditengah masyarakat
2	Permasalahan dalam Bidang POLITIK DALAM NEGERI	1. Terdapatnya gejala politisa si nilai–nilai agama dan kepercayaan
		2. Belum optimalnyaorg ani sasi parp ol dalam memberikan pendidikan politik bagi

	masyarakat	
3 Permasala dalam Bida KETAHAN EKONOMI SOSIAL, BUDAYA,	ng angka AN kemiskinan dan	
AGAMA, DA ORGANISAS	_	

		Kelamin		
4	Permasalaha n dalam Bidang KEWASPAD AA N NASIONAL DAN PENANGAN AN KONFLIK	Terdapatnya potensi konflik vertical dan horizontal dari aspek IPOLEKSOSBU DHUKAM		
		Tranformasi teknologi industry dan komunikasi		

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupkan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan politik masuk dalam unsur pemerintahan umum dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung misi Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif serta misi Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter hal ini sudah sejalan dengan renstra Badan dan Kesatuan Bangsa dan Politik dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yang dibebankan dengan target indikator yang selaras dengan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain. Pada Rancangan awal RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapatkan Proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebesar Rp.52.316.473.947,00-,

2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2023 tetap akan berdasarkan Permendagri 90 dimana Program dan Kegiatan sudah ditetapkan yang bisa dilakukan hanya memilih Program Kegiatan yang sudah

tersedia. Jadi masyarakat hanya bisa mengusulkan Program atau Kegiatan ada di Permendagri 90 tersebut.

Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas dan tetap menerima masukan atau usulan dari masyarakat, program dan kegiatan yang diajukan walaupun tidak melalui proses penjaringan aspirasi dari stakeholder bidang kesatuan bangsa dan politik dengan pelaksanaan Forum OPD, namun koordinasi dilakukan melalui telepon dan media sosial whatsapp.

Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan proses penjaringan aspirasi dari stake holder dibidang Kesbang dengan melaksanakan Forum OPD.

B A B III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum di daerah merupakan perwakilan dari pemerintah pusat yang dibawah koordinasi ditjen politik dan pemerintahan umum kementerian dalam negeri Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi pada tahun 2022 sampai dengan 2023 arah kebijakan rencana kerja ditjen Politik dan pemerintahan Umum penekanannya pada peningkatan IT dan Sumber Daya Manusia, sedangkan tugas Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi menyiapkan data yang dibutuhkan. Selain itu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, khususnya dilampiran yang menyatakan tahapan pemilu dan pilkada serentak 2024 tahapannya dimulai pada bulan juni tahun 2022, sehingga Bakesbangpol prov. Sulsel sebagai penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum di Daerah, wajib mensuport baik dari sisi penyelenggaraan dan sisi keamanan dan persatuan dalam rangka mewujudkan tujuan Renstra Bakesbangpol Prov. Sulsel.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka untuk mencapai prioritas pembangunan, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi maka dalam Renstra Bakesbangpol 2018-2023 telah ditetapkan *tujuan pembangunan* daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu :

Mewujudkan Sulawesi Selatan yang aman, damai dan demokratis.

Berdasarkan tujuan jangka menengah tersebut maka ditetapkan tujuan renja 2023 sama dengan yang tertuang dalam Renstra.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan baik tujuan jangka menengah maupun tujuan renja tahun 2023 maka telah ditetapkan **sasaran** yang akan dicapai pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat.

- 2. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia di Sulawesi Selatan.
- 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.

Dari ketiga sasaran diatas berdasarkan perubahan Renstra 2018-2023 telah ditetapkan perubahan indikatornya, Akan tetapi berdasarkan saran dari Kemenpan RB dan hasil asistensi PK oleh tim asistensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kami diminta untuk mengembalikan Indikator semula dengan rincian sebagai berikut:

Semula :Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

N		0.0.5			TAR		NERJA		RAN
Ο.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR S	ASARAN			TAHU		1
					2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Mewujudkan	Meningkatn	Jumlah Konflik	Sosial yang		120	110	100	90
	Sulsel aman,	ya	berhubungan	dengan					
	damai dan	keamanan	kesatuan bangsa	a dan politik					
1	demokratis	dan							
'		ketenterama							
		n							
		masyarakat							
		Meningkatny							
		a indeks	Nilai Indeks	Demokrasi					
		Demokrasi	Indonesia di Sulse	el	70,79	71,2	71,29	71,7	71,79
		Indonesia di				9		9	
		Sulsel							

	Meningkatny	Meningkatny	% Capaian Kinerja Program		90	95	100
2	а	а	Prangkat Daerah		90	90	100
	Akuntabilitas	Akuntabilitas	Nilai Temuan Material LHP		100	100	100

> Menjadi :

NI.				TAR	GET KI	NERJA	SASAF	RAN
N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PADA	TAHUI	N KE-	
0.				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Sulsel aman, damai dan demokratis	Meningkatn ya keamanan dan ketenteram a n masyarakat	Persentase potensi konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatn y a indeks Demokrasi Indonesia di Sulsel	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sulsel	70,79	71,2 9	71,29	9	71,79
2	Meningkatny a Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatn y a Akuntabilita s Kinerja, Perencana a n dan Pengelolaa n Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	80	85	90	95	100
			Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah			90	95	100
			Nilai Temuan Material LHP yang diselesaikan			100	100	100

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam menyusun Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Bakesbangpol tahun 2023 merujuk pada permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventraisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Renstra Perubahan Bakesbangpol Prov. Sulsel 2018-2023, terdapat perbedaan antara permedagri 13 yang merupakan pedomana penyusunan terdahulu dibandingkan dengan permendagri 90 terutama dari segi prinsip dasar, pada permendagri 90 yang dipakai saat ini kita tidak diberi ruang untuk membuat sendiri nama program, kegiatan dan sub kegiatan tetapi hanya bisa memilih dari daftar yang sudah ada, bahkan inti latar sub kegiatan juga telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventraisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain itu dalam memilih program, kegiatan dan sub kegiatan badan kesatuan bangsa dan politik memperhatikan pencapaian visi dan misi kepala daerah yang berdasarkan permendagri 86 tahun 2017 dalam hal ini OPD atau badan kesatuan bangsa dan politik tidak diperkenankan lagi merumuskan visi dan misi tetapi harus merujuk pada visi dan misi kepala daerah. Visi dan misi kepala daerah yang dijadikan rujukan badan kesatuan bangsa dan politik adalah misi 1 dan misi 4 yaitu : 1. Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif dan misi, 4 .Mewujudkan Kualitas Manusia yang kompetitif, inklusif dan Berkarakter.

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya sesuai dengan permendagri 86 tahun 2017 seperti SDG'S, NSPK dan SPM khusus untuk badan kesatuan bangsa dan politik prov sulsel kami tidak memliki target dari pemerinta pusat.

Berdasarkan metode diatas badan kesatuan bangsa dan politik mengajukan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan terdiri dari 6 program, 13 Kegiatan dan 93 Sub kegiatan. Sebagaimana terlampir pada Tabel. T-C.33:

Tabel. T-C.33

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

				Urusan/ Bidang		Indikator Kinerja						Renca	na Tahun 202	3				Catata	Prakiraan M	Maju Rencan	a Tahun 2024
				Urusan/		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					Target Cap	aian Kinerja			Pagu Indil	katif (Dm.)		n	Target Capa	ian Kinerja	Kebutuhan
	K	ode		Program/ Kegiatan/ Sub	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pro	gram	Keluaran S	ub Kegiatan	Hasil K	egiatan	Pagu Indii	катіг (кр.)	Sumber Dana	Pentin	Tolok Ukur	Target	Dana/ Pagu Indikati
_	_	_	_	Kegiatan					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		g	TOTOK OKUI	larget	(Rp.)
8	+	-	+	UNSUR PEMERINT	AHAN UMUM																T
8 0	1			KESATUAN BANGS	A DAN POLITIK										53,606,119,214	55,653,601,462	!				29,355,170,5
8 0	1 01			PROGRAM PENUN	JANG URUSAN PEN	MERINTAHAN DAE	RAH PROVINSI								9,472,961,184	9,790,169,012					13,777,721,4
	1 01	1	11	POLOF TRUMS DISSOCIAL REPORTS CON	janggaran, dan Eval	80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SHAMOSTOCIONI GOVERNO GARANTA GARANTA			=					254,632,876	723,495,024	1				568,016,80
0	101	1.0	-	refericariaan, reng	janggaran, dan Eval	uasi Killerja Ferang	gkat Daeran	Semua							254,032,870	723,493,024	1				308,010,80
8 0	1 01	1.0	1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Dokumen	2 Dokumen			170,731,100	639,441,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				254,507,86
8 0	1 01	1.0	1 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			1,369,600	1,369,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				78,476,77
8 0	1 01	1.0	1 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			9,901,500	9,901,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				81,146,57
8 0	1 01	1.0	1 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			5,901,500	5,901,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13,220,55
8 0	1 01	1.0	1 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			4,095,000	4,095,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,067,80
8 0	1 01	1.0	1 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			21 Laporan	21 Laporan			31,711,176	31,862,724	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				113,756,22

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.25.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	Urusan/ Bidang		Indikator Kinerja						Renca	na Tahun 2023	3				Catata	Prakiraan N	Maju Rencana	Tahun 2024
	Urusan/							Target Cap	aian Kinerja				e 0227221 S		n	Target Capa	ian Kinerja	Kebutuhan
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub	Capaian Program	Keluaran Sub	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Proc	gram	Keluaran S	ıb Kegiatan	Hasil Ke	egiatan	Pagu Indi	katif (Rp.)	Sumber Dana	Pentin			Dana/
	Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		g	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
	Regiutuii		Ikhtisar Realisasi			Sebeluiii	Jesudan	Seperani	Sesudan	Sepelatii	Sesudan	Sepelani	Sesudan					(Kp.)
			Kinerja SKPD															
															_			
					Semua Kab/Kota,													
	Evaluasi Kinerja		Jumlah Laporan		Semua			1012					0.000000000	PENDAPATAN				
8 01 01 1.01 07	Perangkat Daerah		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kecamatan,			1 Laporan	1 Laporan			30,923,000	30,923,000	ASLI DAERAH (PAD)				14,841,002
			r erangkat Daeran		Semua									(FAD)				
					Kelurahan													
8 01 01 1.02	Administrasi Keua	ngan Perangkat Da	erah						-			6,354,364,589	6,338,995,374					9,191,561,769
					Semua													
	Penyediaan Gaji		Jumlah Orang		Kab/Kota,									PENDAPATAN				
8 01 01 1.02 01	dan Tunjangan		yang Menerima		Semua			50 Orang/	50 Orang/			6,123,865,137	6,108,192,826	ASLI DAERAH				8,740,099,179
	ASN		Gaji dan Tunjangan ASN		Kecamatan, Semua			Bulan	Bulan					(PAD)				
			ranjangan Abiy		Kelurahan													
										-								+
	Pelaksanaan		Jumlah Dokumen Penatausahaan		Semua Kab/Kota,													
	Penatausahaan		dan		Semua			12 Dokume	12 Dokume					PENDAPATAN				
8 01 01 1.02 03	dan Pengujian/Verifikas		Pengujian/Verifik		Kecamatan,			n	n			30,027,100	30,027,100	ASLI DAERAH (PAD)				38,964,489
	i Keuangan SKPD		asi Keuangan		Semua									(FAD)				
			SKPD		Kelurahan													
					Semua													
	Koordinasi dan		Jumlah Dokumen		Kab/Kota,			1000000 10						PENDAPATAN				
8 01 01 1.02 04	Pelaksanaan		Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan		Semua Kecamatan,			12 Dokume n	12 Dokume n			10,931,800	10,931,800	ASLI DAERAH				23,249,442
	Akuntansi SKPD		Akuntansi SKPD		Semua			"	"					(PAD)				
					Kelurahan													
			Jumlah Laporan															
			Keuangan Akhir		_													
	Koordinasi dan		Tahun SKPD dan		Semua Kab/Kota,													
	Penyusunan		Laporan Hasil		Semua									PENDAPATAN				
8 01 01 1.02 05	Laporan Keuangan		Koordinasi Penyusunan		Kecamatan,			1 Laporan	1 Laporan			3,843,600	3,843,600	ASLI DAERAH (PAD)				65,915,445
	Akhir Tahun SKPD		Laporan		Semua									(FAD)				
			Keuangan Akhir		Kelurahan													
			Tahun SKPD															
			1 LL D.		Semua													
	Pengelolaan dan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan		Kab/Kota,									PENDAPATAN				
8 01 01 1.02 06	Penyiapan Bahan		Pemeriksaan dan		Semua			1 Dokumen	1 Dokumen			1,996,800	1,996,800	ASLI DAERAH				994,243
	Tanggapan Pemeriksaan		Tindak Lanjut		Kecamatan, Semua									(PAD)				- A
	rementsdan		Pemeriksaan		Kelurahan													
										-			-					+
			Jumlah Laporan Keuangan															
			Bulanan/															
	Koordinasi dan		Triwulanan/Seme		Semua													
	Penyusunan		steran SKPD dan		Kab/Kota,									PENDAPATAN				
8 01 01 1.02 07	Laporan Keuangan		Laporan		Semua			12 Laporan	12 Laporan			173.063.352	174 345 448	ASLI DAERAH				185,493,637
0 01 01 1.02 07	Bulanan/		Koordinasi Penyusunan		Kecamatan,			12 Euporum	12 Euporum			175,005,552	174,545,440	(PAD)				105,455,057
	Triwulanan/Semest eran SKPD		Laporan		Semua Kelurahan													
	erari SKFU		Keuangan		Kelulaliali													
			Bulanan/Triwulan															
			an/Semesteran															

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.25.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	Urusan/ Bidang		Indikator Kinerja						Renca	na Tahun 202	3				Catat	Prakiraan N	Maju Rencana	Tahun 2024
	Urusan/	-						Target Cap	aian Kinerja				1 122		Catata n	Target Capa	ian Kinerja	Kebutuhan
Kode	Program/	Capaian Program	Keluaran Sub	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Pro	gram		ub Kegiatan	Hasil K	egiatan	Pagu Indi	katif (Rp.)	Sumber Dana	Pentin			Dana/
	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian 1 Togram	Kegiatan	. man regiment	Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Junioe Duna	g	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikati (Rp.)
			SKPD															(
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis		Semua													
8 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen			10,636,800	9,657,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,862,64
8 01 01 1.03	Administrasi Barai	ng Milik Daerah pag	la Perangkat Daeral	h								51,348,000	51,348,000				1	49,942,11
					Semua		1					- 1,- 1,-1	2.72.527.22					
8 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			31,170,000	31,170,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				21,760,47
8 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan	1 Laporan			20,178,000	20,178,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				28,181,63
8 01 01 1.05	Administrasi Kepe	gawaian Perangkat	Daerah									228,835,752	179,138,848					565,745,73
8 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 Paket 1 Paket	0 Paket 1 Paket			87,050,000	87,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				122,377,17
8 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					12 Dokume n	12 Dokume n			58,379,776	58,531,324	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				57,109,56
8 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Dokume n	12 Dokume n			33,405,976	33,557,524	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				52,188,77
8 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 Orang 1 Orang	0 Orang 1 Orang			50,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				55,235,73

	Urusan/ Bidang		Indikator Kinerja						Renca	na Tahun 202	3					Prakiraan N	/Jaju Rencan	a Tahun 2024
	Urusan/							Target Cap	aian Kinerja						Catata	Target Capa	ian Kineria	Kebutuhan
Kode	Program/	Capaian Program	Keluaran Sub	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Dro	gram		ub Kegiatan	Uneil V	(egiatan	Pagu Indi	katif (Rp.)	Sumber Dana	n Pentin	iai ger eupa		Dana/
	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Kegiatan	nasii kegiatan	Kegiatan				_			61.1		Sumber Dana	g	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif
	Regiatan					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		_			(Rp.)
			Jumlah Pegawai Berdasarkan															
			Tugas dan Fungsi															
			yang Mengikuti															
			Pendidikan dan															
			Pelatihan															
8 01 01 1.06	Administrasi Umu	m Perangkat Daera	h						ė.			967,950,276	1,143,132,224					1,578,405,415
			Jumlah Paket															
	Penyediaan		Komponen		Semua Kab/Kota,													
	Komponen		Instalasi		Semua									PENDAPATAN				
8 01 01 1.06 01	Instalasi		Listrik/Peneranga		Kecamatan,			1 Paket	1 Paket			41,124,800	31,242,800	ASLI DAERAH				10,338,689
	Listrik/Penerangan		n Bangunan		Semua									(PAD)				
	Bangunan Kantor		Kantor yang Disediakan		Kelurahan													
																		-
			Jumlah Paket															
			Bahan Logistik		Semua													
	Penyediaan		Kantor yang Disediakan		Kab/Kota,									PENDAPATAN				
8 01 01 1.06 02	Peralatan dan		Jumlah Paket		Semua			1 Paket	1 Paket			0	0	ASLI DAERAH				56,751,116
0 01 01 1.00 02	Perlengkapan		Peralatan dan		Kecamatan,			0 Paket	0 Paket			٥		(PAD)				30,731,110
	Kantor		Perlengkapan		Semua Kelurahan													
			Kantor yang		Keluranan													
			Disediakan															
·					Semua													
	Penyediaan Barang		Jumlah Paket Barang Cetakan		Kab/Kota,									PENDAPATAN				
8 01 01 1.06 05			dan		Semua			1 Paket	1 Paket			125,390,300	125 390 300	ASLI DAERAH				113,852,859
0 01 01 1.00 05	Penggandaan		Penggandaan		Kecamatan,			Traket	Traket			123,330,300	123,330,300	(PAD)				113,032,033
	33		yang Disediakan		Semua Kelurahan													
																		1
					Semua Kab/Kota,													
	Penyediaan		Jumlah Paket		Semua							500,000,000,000,000,000		PENDAPATAN				
8 01 01 1.06 07	Bahan/Material		Bahan/Material		Kecamatan,			1 Paket	1 Paket			19,801,000	19,801,000	ASLI DAERAH				91,571,243
			yang Disediakan		Semua									(PAD)				
					Kelurahan													
					Semua													
			Jumlah Laporan		Kab/Kota,									PENDAPATAN				
8 01 01 1.06 08	Fasilitasi		Fasilitasi		Semua			1 Laporan	1 Laporan			230,833,200	230.833.200	ASLI DAERAH				296.815.829
0 01 01 1.00 00	Kunjungan Tamu		Kunjungan Tamu		Kecamatan,			Laporan	Laporari			230,033,200	230,033,200	(PAD)				250,015,025
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Semua Kelurahan													
									-									1
			Jumlah Laporan		Semua													
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi		Penyelenggaraan		Kab/Kota, Semua									PENDAPATAN				
8 01 01 1.06 09	dan Konsultasi		Rapat Koordinasi		Kecamatan,			1 Laporan	1 Laporan			516,346,200	701,258,600	ASLI DAERAH				986,355,780
	SKPD		dan Konsultasi		Semua									(PAD)				
			SKPD		Kelurahan													
-			Jumlah Dokumen														1	
	Dukungan		Dukungan		Semua													
	Pelaksanaan		Pelaksanaan		Kab/Kota,			12.0-1	12 Delem					PENDAPATAN				
8 01 01 1.06 11	Sistem Pemerintahan		Sistem		Semua Kecamatan,			12 Dokume n	12 Dokume n			34,454,776	34,606,324	ASLI DAERAH				0
	Berbasis Elektronik		Pemerintahan		Semua			"	1					(PAD)				
	pada SKPD		Berbasis Flottenik nada		Kelurahan													
		1	Elektronik pada					1										1

	Urusan/ Bidang		Indikator Kinerja						Renca	ına Tahun 202	3				C-4-1	Prakiraan N	Лаји Rencana	Tahun 2024
	Urusan/							Target Cap	aian Kinerja			0.0000000000000000000000000000000000000	120 - 100 - 1		Catata n	Target Capa	ian Kinerja	Kebutuhan
Kode	Program/	Capaian Program	Keluaran Sub	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Pro	gram		ub Kegiatan	Hasil K	egiatan	Pagu Indi	catif (Rp.)	Sumber Dana	Pentin		,	Dana/
	Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		g	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			SKPD															
8 01 01 1.07	Pengadaan Barang	Milik Daerah Penu	njang Urusan Peme	erintah Daerah								369,556,000	432,567,500					1,004,930,196
8 01 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				735,000,000
8 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Paket	1 Paket			186,728,000	163,648,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				28,818,645
8 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			29 Unit	29 Unit			182,828,000	268,919,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				241,111,551
8 01 01 1.08	Penvediaan Jasa P	enunjang Urusan Pe	merintahan Daeral	1								436,905,591	298,413,942			1	l	212,311,200
8 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan			436,905,591	298,413,942	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				136,854,383
8 01 01 1.09	Pemeliharaan Bara	ng Milik Daerah Pe	nuniang Urusan Pe	merintahan Daerah	1							809,368,100	623,078,100					606,808,258
8 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	July Sucidified	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jacob Sacrat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			23 Unit	23 Unit			598,545,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				528,658,824
8 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 Unit	0 Unit			8,323,100	8,323,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
8 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 Unit 10 Unit	0 Unit 10 Unit			55,000,000	55,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				43,408,084

	Urusan/ Bidang		Indikator Kinerja						Renca	na Tahun 202	3				c	Prakiraan I	Maju Rencar	a Tahun 2024
	Urusan/							Target Cap	aian Kinerja				2 338 11 11		Catata n	Target Capa	ian Kineria	Kebutuhan
Kode	Program/	Capaian Program	Keluaran Sub	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Pro	gram		ub Kegiatan	Haeil K	egiatan	Pagu Indi	katif (Rp.)	Sumber Dana	Pentin	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Dana/
	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Frogram	Kegiatan	Thas it regionals	Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumper Duna	g	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatii (Rp.)
			Jumlah Gedung		Semua													(4,)
	Pemeliharaan/Reha		Kantor dan		Kab/Kota,													
. 20 (20) 2022 22)	bilitasi Gedung		Bangunan		Semua									PENDAPATAN				
01 01 1.09 09	Kantor dan		Lainnya yang		Kecamatan,			1 Unit	1 Unit			147,500,000	147,500,000	ASLI DAERAH				34,741,35
	Bangunan Lainnya		Dipelihara/Direha		Semua									(PAD)				
			bilitasi		Kelurahan													
8 01 02	PROGRAM PENGU	ATAN IDEOLOGI PA	NCASILA DAN KAI	RAKTER KEBANGSA	AN							7,534,682,260	3,146,371,100					798,696,82
8 01 02 1.01	Perumusan Kebijal	kan Teknis dan Pem	antapan Pelaksana	an Bidang Ideologi	Pancasila dan K	arakter Keba	ngsaan	7				7,534,682,260	3,146,371,100					798,696,82
	Penyusunan		Jumlah Dokumen															
	Program Kerja di		Program Kerja di															
	Bidang Ideologi		Bidang Ideologi															
	Wawasan		Wawasan		Semua													
	Kebangsaan, Bela		Kebangsaan, Bela		Kab/Kota,													
	Negara, Karakter		Negara, Karakter		Semua									PENDAPATAN				110000000000000000000000000000000000000
8 01 02 1.01 01	Bangsa,		Bangsa,		Kecamatan.			6 Dokumen	6 Dokumen			251,970,900	251,970,900	ASLI DAERAH				113,874,02
	Pembauran		Pembauran		Semua									(PAD)				
	Kebangsaan,		Kebangsaan,		Kelurahan													
	Bhineka Tunggal		Bhineka Tunggal		Troid and													
	Ika dan Sejarah		Ika dan Sejarah															
	Kebangsaan		Kebangsaan yang															
			Disusun															
	Perumusan		Jumlah Kebijakan															
	Kebijakan Teknis di		Teknis di Bidang															
	Bidang Ideologi		Ideologi															
	Wawasan		Wawasan		Semua													
	Kebangsaan, Bela		Kebangsaan, Bela		Kab/Kota,													
	Negara, Karakter		Negara, Karakter		Semua									PENDAPATAN				
8 01 02 1.01 02	Bangsa,		Bangsa,		Kecamatan,			0 Dokumen	0 Dokumen			6,597,888,560	1,097,878,900	ASLI DAERAH				
	Pembauran		Pembauran		Semua									(PAD)				
	Kebangsaan,		Kebangsaan,		Kelurahan													
	Bhineka Tunggal		Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah															
	Ika dan Sejarah																	
	Kebangsaan		Kebangsaan yang Disusun															
			Programme /								-							1
	Pelaksanaan		Jumlah Orang															
	Koordinasi di		yang Mengikuti Koordinasi di															
	Bidang Ideologi		Bidang Ideologi															
	Wawasan		Wawasan		Semua													
	Kebangsaan, Bela		Kebangsaan, Bela		Kab/Kota,									PENDAPATAN				
8 01 02 1.01 04	Negara, Karakter		Negara, Karakter		Semua			8 Orang	8 Orang			684,822,800	1 796 521 300	ASLI DAERAH				684,822,800
0 01 02 1.01 04	Bangsa,		Bangsa,		Kecamatan,			8 Crang	8 Orang			004,022,000	1,730,321,300	(PAD)				004,022,000
	Pembauran		Pembauran		Semua									(IAD)				
	Kebangsaan,		Kebangsaan,		Kelurahan													
	Bhineka Tunggal		Bhineka Tunggal															
	Ika dan Sejarah		Ika dan Sejarah															
	Kebangsaan		Kebangsaan															
8 01 03	PROGRAM PENING	GKATAN PERAN PA	RTAI POLITIK DAN	LEMBAGA PENDID	IKAN MELALUI I	PENDIDIKAN	POLITIK DAN	PENGEMBAN	IGAN ETIKA SI	ERTA BUDAYA	POLITIK	6,475,597,552	5,505,655,648					9,169,359,135
8 01 03 1.01				an Bidang Pendidik an Umum Kepala D				an Demokrasi	i, Fasilitasi Kele	embagaan Per	merintahan,	6,475,597,552	5,505,655,648					9,169,359,135
	Penyusunan		Jumlah Dokumen		Semua		I											
	Program Kerja di		Program Kerja di		Kab/Kota,									DENIDABATA				
0 01 03 101	Bidang Pendidikan		Bidang		Semua			1.0-1	1.0-1			F 507.5	F 5035	PENDAPATAN				40.000
8 01 03 1.01 01	Politik, Etika		Pendidikan		Kecamatan.			1 Dokumen	1 Dokumen			5,507,500	5,507,500	ASLI DAERAH				48,925,773
	Budaya Politik,		Politik. Etika		Semua									(PAD)				
	Peningkatan																	

	Urusan/ Bidang		Indikator Kinerja						Renca	na Tahun 202	3					Prakiraan N	/laju Rencana	Tahun 2024
	Urusan/							Target Cap	aian Kinerja						Catata n	Target Capa	ian Kinerja	Kebutuhan
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pro	gram	Keluaran S	ub Kegiatan	Hasil K	egiatan	Pagu Indi	katif (Rp.)	Sumber Dana	Pentin	T. I. I. III		Dana/ Pagu Indikatif
	Kegiatan		Regiduali	9,557	Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		g	Tolok Ukur	Target	(Rp.)
	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		Kelurahan													
8 01 03 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 Dokumen	3 Dokumen			167,590,992	167,894,088	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				208,262,739
8 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Penilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			200 Orang	200 Orang			6,213,141,760	5,243,141,760	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8,731,230,361

	Urusan/ Bidang		Indikator Kinerja						Renca	na Tahun 202	3				C-1-1	Prakiraan N	Maju Rencana	a Tahun 2024
220020	Urusan/		NAME AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PA		20 03 92 94 95 95			Target Cap	aian Kinerja						Catata n	Target Capa	ian Kinerja	Kebutuhan
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub	Capaian Program	Keluaran Sub	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Pro	gram	Keluaran S	ub Kegiatan	Hasil K	egiatan	Pagu Indil	katif (Rp.)	Sumber Dana	Pentin			Dana/
	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	1	g	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
8 01 03 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Penilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Penillihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 Orang	6 Orang			28,329,100	28,084,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				65,474,760
8 01 03 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Penilihan Umum/Penilihan Umum/Penilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Laporan	2 Laporan			61,028,200	61,028,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				115,465,502
8 01 04	PROGRAM PEMBE	RDAYAAN DAN PEI	NGAWASAN ORGAI	NISASI KEMASYARA	AKATAN		1					106,374,400	106,374,400		W S			1,865,211,755
8 01 04 1.01	Perumusan Kebijal	kan Teknis dan Pem	antapan Pelaksana	an Bidang Pemberd	layaan dan Peng	jawasan Orga	nisasi Kemas	yarakatan				106,374,400	106,374,400					1,865,211,755
8 01 04 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			32,445,600	32,445,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				63,719,224

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.25.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	Urusan/ Bidang	Indikator Kinerja							Renca	na Tahun 202	3				Catata	Prakiraan N	/laju Rencana	Tahun 2024
Kode	Urusan/	Capaian Program	202120		Lokasi Output			Target Cap	aian Kinerja						n	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan
	Program/ Kegiatan/ Sub		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Pro	gram	Keluaran S	ub Kegiatan	Hasil K	egiatan	Pagu Indil	katif (Rp.)	Sumber Dana	Pentin			Dana/
	Kegiatan/ Sub Kegiatan				Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		g	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatii (Rp.)
			Jumlah Kebijakan															
			Dibidang															
			Pendaftaran Ormas,															
			Pemberdayaan															
			Ormas, Evaluasi															
			dan Mediasi															
			Sengketa Ormas,															
			Pengawasan															
			Ormas dan Ormas Asing di															
			Daerah yang															
			Disusun															
			Jumlah Orang yang Mengikuti															
	Pelaksanaan		Pelaksanaan															
	Kebijakan Dibidang		Kebijakan															
	Pendaftaran		Dibidang		Semua													
	Ormas,		Pendaftaran Ormas,		Kab/Kota,									PENDAPATAN				
8 01 04 1.01 03	Pemberdayaan Ormas, Evaluasi		Pemberdayaan		Semua Kecamatan,			200 Orang	200 Orang			30,525,400	30,525,400	ASLI DAERAH				1,764,226,061
	dan Mediasi		Ormas, Evaluasi		Semua			50						(PAD)				
	Sengketa Ormas,		dan Mediasi Sengketa Ormas,		Kelurahan													
	Pengawasan		Pengawasan		A4-24-0000000000000000000000000000000000													
	Ormas dan Ormas		Ormas dan															
	Asing di Daerah		Ormas Asing di															
			Daerah															
	Pelaksanaan		Jumlah Orang yang Mengikuti															
	Koordinasi		Koordinasi															
	Dibidang Pendaftaran		Dibidang Pendaftaran		Semua													
	Ormas,		Ormas,		Kab/Kota,													
8 01 04 1.01 04	Pemberdayaan		Pemberdayaan		Semua			0 Orang	0 Orang			23,567,000	23 567 000	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
8 01 04 1.01 04	Ormas, Evaluasi		Ormas, Evaluasi		Kecamatan,			Orang	Orang			23,367,000	23,367,000	(PAD)				
	dan Mediasi Sengketa Ormas,		dan Mediasi Sengketa Ormas,		Semua Kelurahan													
	Pengawasan		Pengawasan		Kelalalal													
	Ormas dan Ormas		Ormas dan															
	Asing di Daerah		Ormas Asing di Daerah															
	Pelaksanaan		Jumlah Laporan															
	Monitoring		Hasil Monitoring															
	Evaluasi dan		Evaluasi dan Pelaporan															
	Pelaporan		Dibidang															
	Dibidang Pendaftaran		Pendaftaran		Semua Kab/Kota,													
8 01 04 1.01 05	Ormas,		Ormas,		Semua			1 Langrar	1 Langrar			19,836,400	10.036.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH				37,266,470
0 01 04 1.01 05	Pemberdayaan		Pemberdayaan Ormas, Evaluasi		Kecamatan,			1 Laporan	1 Laporan			19,836,400	19,836,400	(PAD)				37,266,470
	Ormas, Evaluasi dan Mediasi		dan Mediasi		Semua Kelurahan									()				
	Sengketa Ormas,		Sengketa Ormas,		Keluranan													
	Pengawasan		Pengawasan Ormas dan															
	Ormas dan Ormas		Ormas dan Ormas Asing di															
	Asing di Daerah		Daerah															

	Urusan/ Bidang		Indikator Kinerja						Renca	na Tahun 2023	3				c-1-1	Prakiraan M	laju Rencana	Tahun 2024
	Urusan/							aian Kinerja					Catata n	Target Canalan Vinceia		Kebutuhan		
Kode	Program/	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Prog	ıram		ub Kegiatan	Hasil Ke	egiatan	Pagu Indi	katif (Rp.)	Sumber Dana	Pentin	, ,		Dana/
	Kegiatan/ Sub Kegiatan				Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	1	g	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
8 01 05		NAAN DAN PENGE	MRANGAN KETAHA	NAN EKONOMI SI	OSIAL DAN BUI		Jesadan	Sebelulii	Sesudun	Septiani	Sesudan	1,378,277,900						1,470,033,540
8 01 05 1.01		kan Teknis dan Pem					_					1,378,277,900						1,470,033,540
8 01 05 1.01	Perumusan Kebijai	kan Teknis dan Pem	•	an bidang Ketahan	EKONOMI, 30	siai dan buday	d	1				1,378,277,900	1,378,277,900					1,470,033,340
8 01 05 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 Dokumen	4 Dokumen			58,044,500	58,044,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				203,875,100
8 01 05 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			200 Orang	200 Orang			1,236,091,200	1,236,091,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,206,904,425
8 01 05 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			200 Orang	200 Orang			47,134,000	47,134,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				53,635,580
8 01 05 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,			3 Laporan	3 Laporan			37,008,200	37,008,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,618,435

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.25.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	Urusan/ Bidang		Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023											Prakiraan Maju Rencana Tahun		
	Urusan/							Target Cap	aian Kinerja						Catata n	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan
Kode	Program/	Capaian Program	Keluaran Sub	Hasil Kegiatan	Lokasi Output							Pagu Indi	katif (Rp.)	Sumber Dana				Dana/
	Kegiatan/ Sub Kegiatan	capaian i rogium	Kegiatan		Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Juniber Buna	g	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatii (Rp.)
			Bidang										55544411					(14)
	Bidang Ketahanan		Ketahanan															
	Ekonomi, Sosial,		Ekonomi, Sosial,															
	Budaya dan		Budaya dan															
	Fasilitasi		Fasilitasi															
	Pencegahan		Pencegahan															
	Penyalagunaan		Penyalagunaan		Semua													
	Narkotika, Fasilitasi		Narkotika,		Kelurahan													
	Kerukunan Umat		Fasilitasi															
	Beragama dan		Kerukunan Umat															
	Penghayat		Beragama dan															
	Kepercayaan di		Penghayat															
	Daerah		Kepercayaan di															
			Daerah															
8 01 06	PROGRAM PENIN	GKATAN KEWASPAI	DAAN NASIONAL D	OAN PENINGKATAN	I KUALITAS DAN	FASILITASI P	ENANGANAN	I KONFLIK SO	SIAL				35,726,753,402					2,274,147,844
8 01 06 1.01	Perumusan Kebija	kan Teknis dan Pela	ksanaan Pemantap	an Kewaspadaan N	asional dan Pen	anganan Kon	flik Sosial					28,638,225,918	35,726,753,402	!				2,274,147,844
	Penyusunan		Jumlah Dokumen															
	Program Kerja di		Program Kerja di															
	Bidang		Bidang															
	Kewaspadaan Dini,		Kewaspadaan															
	Kerja Sama		Dini, Kerja Sama															
	Intelijen,		Intelijen,															
	Pemantauan		Pemantauan															
	Orang Asing,		Orang Asing,		Semua Kab/Kota,													
	Tenaga Kerja Asing		Tenaga Kerja Asing dan		Semua									PENDAPATAN				
8 01 06 1.01 01	dan Lembaga		Lembaga Asing,		Kecamatan,			1 Dokumen	1 Dokumen			1,572,000	1,572,000	ASLI DAERAH				20,413,208
	Asing,		Kewaspadaan		Semua Kelurahan							100,000,000		(PAD)				
	Kewaspadaan		Perbatasan Antar															
	Perbatasan Antar		Negara, Fasilitasi															
	Negara, Fasilitasi		Kelembagaan															
	Kelembagaan		Bidang															
	Bidang		Kewaspadaan,					1										
	Kewaspadaan, serta Penanganan		serta Penanganan															
	Konflik di Daerah		Konflik di Daerah															
	Korilik di Daeran		yang Disusun															
	Penyusunan Bahan		Jumlah Kebijakan															
	Perumusan		di Bidang															
	Kebijakan di		Kewaspadaan															
	Bidang		Dini, Kerja Sama															
	Kewaspadaan Dini,		Intelijen,															
	Kerja Sama		Pemantauan															
	Intelijen, Pemantauan		Orang Asing,		Semua													
	Orang Asing,		Tenaga Kerja		Kab/Kota,													
	Tenaga Kerja Asing		Asing dan		Semua			12 Dokume	12 Dokume					PENDAPATAN				
8 01 06 1.01 02	dan Lembaga		Lembaga Asing,		Kecamatan.			n	n			1,572,000	1,572,000	ASLI DAERAH				39,331,446
	Asing,		Kewaspadaan		Semua			["						(PAD)				
	Kewaspadaan		Perbatasan Antar		Kelurahan													
	Perbatasan Antar		Negara, Fasilitasi															
	Negara, Fasilitasi		Kelembagaan															
	Kelembagaan		Bidang															
	Bidang		Kewaspadaan,															
	Kewaspadaan,		serta Penanganan Konflik di Daerah															
	serta Penanganan																	
	Konflik di Daerah		yang Disusun															

Sub Offic Organisa	usi : 8.01.0.00.0.00.25	S.COCO BADAN RES	Indikator Kinerja	ANTOLITIK	T .				Renca	na Tahun 202	3					Prakiraan N	∕laju Rencana	Tahun 2024
	Urusan/							Target Cap	aian Kinerja						Catata n	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pro	gram	Keluaran S	ub Kegiatan	Hasil K	egiatan	Pagu Indi	katif (Rp.)	Sumber Dana	Pentin			Dana/ Pagu Indikatif
	Kegiatan				Regiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	1	g	Tolok Ukur	Target	(Rp.)
8 01 06 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			300 Orang	300 Orang			28,209,681,718	35,152,998,002	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,122,856,678
8 01 06 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijien, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Korflik di Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8 Orang	8 Orang			8,257,000	8,257,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				177,623,716
8 01 06 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			93 Laporan	93 Laporan			58,743,200	142,354,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				284,968,365

Kode	Urusan/ Bidang		Indikator Kinerja						Renca	na Tahun 202	3					Prakiraan N	a Tahun 2024	
	Urusan/		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan			Target Cap	aian Kinerja			27 5 10 100 100 1			Catata n	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program				Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Pentin	Tolok Ukur	Target	Dana/ Pagu Indikatif
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		g	IOIOK UKUI	larget	(Rp.)
	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
8 01 06 1.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Dokume n	12 Dokume n			358,400,000	420,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				628,954,431
							1				TOTAL	53,606,119,214	55,653,601,462			,		29,355,170,58

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel Perubahan Rancangan Akhir Renja sebagaimana terlampir.

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan menyediakan berbagai kebutuhan Barang dan Jasa kantor termasuk barang modal/asset serta dukungan administrasi perjalanan dinas, program ini memiliki 3 indikator yaitu % Realisasi Kegiatan Prangkat Daerah, % ASN Prangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik, % Penurunan temuan berdasarkan LHP. Terdapat 8 kegiatan dan 35 sub kegiatan yang anggarannya direncanakan akan didanai oleh APBD Prov. Sulsel sebesar Rp.9.790.169.012,-dengan rincian Sebagai berikut:
 - 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - A. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - B. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - C. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - D. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - E. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - F. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - G. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - A. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - B. Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - C. Sub kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
 - D. Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - E. Sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - F. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- G. Sub kegiatan Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - A. Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - B. Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - A. Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - B. Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - C. Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - D. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - A. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - B. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - C. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - D. Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - E. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - F. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - G. Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - A. Sub kegiatan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - B. Sub kegiatan Pengadaan Mebel
 - C. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - A. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - A. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - B. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - C. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - D. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- II. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan memiliki 1 indikator yaitu:
 - % Tingkat keikutsertaan aparat dan masyarakat bela negara. Dalam program ini terdapat 1

- kegiatan dan 3 sub kegiatan yang anggarannya direncanakan akan didanai oleh APBD Prov. Sulsel sebesar Rp.3.146.371.100,00- sebagai berikut :
- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
 - A. Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.
 - B. Sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.
 - C. Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.
- III. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, program ini memiliki 2 indikator yang salah satu indikatornya masuk dalam indikator prioritas RPJMD Provinsi Sulawesi selatan yaitu % Penurunan Penyalahgunaan Narkoba, indikator lainnya yaitu % Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan yang anggarannya direncanakan akan didanai oleh APBD Prov. Sulsel sebesar Rp. 1.378.277,00,- dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
 - A. sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 - B. sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 - C. sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 - D. sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

- IV. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan 1 indikator yaitu: % organisasi kemasyarakatan yang memenuhi 4 konsensus kebangsaan, program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan yang anggarannya direncanakan akan didanai oleh APBD Prov. Sulsel sebesar Rp.106.377.800,00,- dengan rincian sebagai berikut:
 - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :
 - A. sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 - B. sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 - C. sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 - D. sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi,dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- V. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, pada program ini memiliki 1 indikator yaitu % Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu dan terdapat 1 kegiatan dan 5 Sub kegiatan, yang anggarannya direncanakan akan didanai oleh APBD Prov. Sulsel sebesar Rp.5.505.655.648,00,- dengan rincian sebagai berikut:
 - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik terdiri dari sub kegiatan yaitu:
 - A. sub kegitan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pemantauan Situasi Politik di Daerah Fasilitasi Kelembagaa.
 - B. sub kegiatan penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,

- Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
- C. sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pemantauan Situasi Politik di DaerahFasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- D. sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
- E. sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/PemilihanUmum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- VI. Program Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan 1 indikator % Penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan, yang anggarannya direncanakan akan didanai oleh APBD Prov. Sulsel sebesar Rp. 35.726.753.402,00,-dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dan terdiri dari beberapa sub kegiatan yang meliputi:
 - A. sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan,
 - B. sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah,
 - C. sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah,

- D. sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah,
- E. sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah,
- F. sub kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Dalam Rencana kerja Bakesbangpol pada tahun 2023 ini pendanaan yang tertera diatas masih pagu indikatif, sehingga pencapaian indikatornya pun sesuai dengan pagu tersebut, apabila pagu indikatifnya tidak sama apalagi dibawahnya ada kemungkinan pencapaian indikator akan menurun.

5.2 Kaidah Pelakasanaan

Pada renja Bakesbangpol tahun 2023 khusunya dari segi pendanaan bisa terpenuhi 100% sesuai pagu indikatif, diharapkan bisa memenuhi seluruh target indikator yang ada, apabila tidak, kemungkinan pencapaian target indikator juga mengalami penurunan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Bakesbangpol akan berkoordinasi dengan Bappelitbangda dan BPKAD untuk rencana pendanaan.

Makassar,

BADAN KESBANGPOL PROV. SULSEL

2023

angkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19631231 198803 1 132



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 968/ VI / TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
 dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021

- tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 8. 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Cara Perubahan Rencana Daerah, serta Tata Panjang Pembangunan Jangka Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 1312);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590)
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
 Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20182023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
 Sulawesi Selatan 301) sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
 Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
 Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah
 Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan
 Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
- 13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, Nomor 20)
- 14. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 9);
- 15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 2023 Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Selatan Tahun 2023, Sulawesi sebagaimana dalam tersendiri tercantum dokumen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat dengan ketentuan sepanjang sesuai Peraturan Perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

> Ditetapkan di Makassar pada tanggal 7 Juni 2023 GUBERNUR SULAWESI SELATAN

> > ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
- 2. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Tempat